

TokohIndonesia

MAJALAH BIOGRAFI PERTAMA DI INDONESIA

DotCom

Volume 07 Rp.14.000

Luar Jabotabek Rp.15.000



**BUNG KARNO
BERDIKARI**

**Hari
Nusantara
2003**

**ROKHMIN
DAHURI**

PEJUANG KELAUTAN DAN PERIKANAN



CHRISTIAN HADINATA

saatnya punya website pribadi

www.esero.com

bikin WEBSITE PRIBADI nggak mahal!

Mengapa harus membayar mahal untuk membangun dan mengelola website pribadi Anda?

Bersama **ESERO**, Anda akan memperoleh semua kreativitas, inovasi, dedikasi dan pelayanan yang berkualitas tanpa aneka biaya tambahan lagi.

Bersama **ESERO**, Anda tak perlu menggaji asisten pribadi untuk mengelola website pribadi Anda.

E-mail:
info@esero.com

 **ESERO**

Web Design & Hosting

KAMI SEDIAKAN 'ASISTEN PRIBADI' ANDA:

HP 0813-107-8888-2 Telp. 021-7077-6232 -021-8370-1736 Fax. 021-9101871

TOKOH UTAMA

PROF. DR. ROKHMIN DAHURI

PEJUANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Inilah sosok seorang pejuang kelautan dan perikanan. Sejak kecil, hidupnya sudah menyatu dengan laut, nelayan dan ikan. Gelar doktornya juga tak terlepas dari masalah pengelolaan sumberdaya lautan. Ia juga seorang yang gigih memperjuangkan terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), yang kini dipimpinnya. Ia dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu 18/1/03. Ia seorang tokoh muda yang pantas dijadikan idola dan teladan. Kisah dan pandangan hidupnya adalah guru yang baik bagi orang lain.10



BERITATOKOH: SAID AGIL HUSIN AL-MUNAWAR Tekad 'Bapa' Penganut Agama, CIPUTRA Si Pengembang Menggeliat Kembali, ALBERT HASIBUAN Garam dalam Aneka Profesi, AHMAD SUJUDI Prinsip Mendahulukan Kewajiban 6



SANGJUARA : CHRISTIAN HADINATA Legenda Hidup Bulu Tangkis Indonesia. Namanya layak menjadi simbol kekuatan bulutangkis Indonesia. Dia adalah legenda hidup yang berhasil mengukir prestasi internasional baik sebagai pemain maupun pelatih. 31

BERITA: HARI NUSANTARA 2003 Terompet Menjaga Keutuhan Negara 5

DEPTHNEWS: GERBANG MINA BAHARI: Dicanangkan Presiden Megawati Soekarnoputri di Teluk Tomini 11-10-2003 16

SELEBRITI: ARNOLD ALOIS SCHWARZENEGGER Terminator Menjadi Gubernur, MIRA LESMANA Produser Bertangan Dingin 32

TOKOHDUNIA: GOLORIA MACAPAGAL-ARROYO Perempuan Piawai Berpolitik 34

KAPURSIRIH: BANGSA MARITIM dan Trade Mark Keberhasilan Kabinet Gotong-Royong 4

TOKOHPILIHAN: JAYA SUPRANA Si Multitalent Pencetus Museum Rekor Muri ini mempunyai beragam predikat, pengusaha pembicara, presenter, penulis, kartunis, pemusik dan pencipta lagu 30

SURAT: Sisi Lain Capres, MUSIKUS dan Komposer, Is HARYANTO Biodata, LAMBANG Partai, PENGAGUM Cak Nur 4

WAWANCARA: ROKHMIN DAHURI: Reorientasi Pembangunan Berbasis Kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga guru besar tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, ini menggagas paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia melakukan reorientasi (pembaharuan) paradigma pembangunannya. 18



TOKOHMAESTRO: BUNG KARNO Presiden RI Pertama menganut ideologi pembangunan 'Berdiri di Atas Kaki Sendiri' 8

COVER: Esero Design.
Foto e-ti/info dkp

■ **MAJALAH BIOGRAFI TOKOH INDONESIA** Edisi Cetak **TOKOHIINDONESIA DOTCOM - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA** ■ **PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI:** Robin Ch Simanullang ■ **REDAKTUR EKSEKUTIF/WEBMASTER:** Atur Lorieclide Paniroy ■ **REDAKTUR:** Tian Son Lang, Marjuka Situmorang, Yayat Suryatna ■ **SEKRETARIS REDAKSI:** Yoeliani Desianna Somali ■ **STAF REDAKSI:** Christian Natamado, Heru B Utomo ■ **BIRO JABAR:** Sumarsono (Kepala), Imam Siswanto ■ **BIRO SUMUT:** Tahi Purba ■ **LAWYER:** Mifa P Singarimbun, SH ■ **KONTRIBUTOR:** Dandy Hendrias, Anis Fuadi, Yusak HS, Hapasan Tampubolon ■ **TATA GRAFIS:** ESERO Design ■ **DIVISI USAHA:** Adur Nursinta (Kepala) ■ **IKLAN:** Doan Adikara Pudan ■ **SIRKULASI & DISTRIBUSI:** Wilson Edward, Kedarton Harianja ■ **JABAR:** Dinni Pujasari ■ **PENERBIT:** pt. Citraprinsip Publisitas Indoadprint ■ **REKENING:** Bank Niaga Supomo Jakarta No.025.01.24000.00.8 ■ **TERDAFTAR:** Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Depkeh dan HAM No.000.2002.23951.24216 ■ **ALAMAT REDAKSI:** Jalan Bukit Duri Tanjakan IX No.26, Tebet, Jakarta Selatan 12830 ■ **Po Box** 4042 JKTJ 13040 ■ **TELEPON** (021) 83701736 - 70776232 - 9101871 ■ **HP** 0812-949-1043 ■ **FAX:** (021) 9101871 ■ **E-MAIL:** redaksi@tokohindonesia.com - iklan@tokohindonesia.com - sirkulasi@tokohindonesia.com ■ **ALAMAT BIRO JAWA BARAT:** Jalan Musaen No.3 Pasirkaliki, Bandung, Telepon-Fax 022-4240689, E-mail: jabar@tokohindonesia.com ■ **SITUS WEB:** www.tokohindonesia.com - www.tokohnasional.com - www.ensiklopedi.com - www.e-ti.com - www.indonesianfamous.com ■ **PERCETAKAN:** PT Visindo Media Persada ■ **HARGA:** Rp.14.000 (Luar Jabotabek Rp.15.000)

SURAT

Sisi Lain Capres

Penyajian TokohIndonesia.com tentang tokoh-tokoh Indonesia yang akan menjadi calon presiden 2004 cukup informatif. Namun tidak cukup berimbang, karena hanya dari sisi positif. Informasi data kekayaannya, apakah pernah KKN, melanggar HAM, tersangkut skandal, terkena pidana, tindakan kurang terpuji dll tak tercantum. Hal ini menjadikan kemungkinan orang memilih kucing dalam karung. Di negara yang maju demokrasinya kedua sisi *track record* calon pemimpin nasional selalu diberikan, sehingga muncul pemimpin yang benar-benar bersih dan dapat diharapkan rakyat.

B Santoso

b_santoso@yahoo.com

Musikus-Composer

Website "Tokoh Indonesia" sangat bagus dan bermutu. Semoga website ini semakin maju dan semakin banyak mencatatkan tokoh-tokoh Indonesia yang bisa menjadi teladan kita semua. Dalam kesempatan ini saya mengusulkan ditambahkannya satu jenis profesi, yaitu profesi musikus/composer, di samping profesi-profesi lain yang sudah terdaftar. Tokoh-tokohnya antara lain: WR. Supratman, H. Mutahar, Ibu Sud, Liberty Manik, N. Simanungkalit. Terima kasih.

Yosef Manik

yosef@component.astra.co.id

*Diakomodasi dalam rubrik Maestro

Is Haryanto

Saya adalah penggemar lagu dan karya cipta Is Haryanto. Mohon diterbitkan biodata beliau yang hingga saat ini beliau masih ada. Banyak para penyanyi dan group band legendaris yang bisa eksis di dunia hiburan ini. Terima kasih atas perhatiannya.

Erllan Atmajaya

Erllano_1969@hotmail.com

Lambang Partai

Redaksi Tokoh Indonesia yang saya hormati. Saya memberikan masukan supaya di web Tokoh Indonesia dimuat lambang-lambang partai di Indonesia yang terbaru. Terima kasih semoga masukan saya dapat dipertimbangkan.

Jamal Mirdad

jamal_tiens@yahoo.com

Pengagum Cak Nur

Dengan hormat, saya salah seorang pengagum Dr. Nurcholis Madjid, karena itu saya ingin memberi dukungan moral kepada beliau dalam usaha beliau untuk menjadi Presiden. Tetapi saya tidak tahu alamat rumah & e-mail beliau. Dapatkah Redaksi memberi tahu kepada saya alamat rumah & e-mail beliau? Terima kasih.

Fadjar Marta

distribution@indoparts.co.id

Bangsa Maritim

Sudah lama bangsa ini hidup terlena di darat. Orientasi kegiatan dan pembangunan terkonsentrasi di darat. Padahal sejak doeloe bangsa ini tahu bahwa negerinya yang disebut tanah-air justru lebih luas lautan daripada daratan. Dua per tiga wilayah Indonesia berupa laut dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km dan terdiri dari sekitar 17.506 pulau. Apalagi, sesungguhnya bukti historis juga menunjukkan bahwa sejak kerajaan Sriwijaya (683 M-1030 M) bangsa ini telah menampakkan eksistensinya sebagai bangsa maritim, walaupun masih terbatas pada pemanfaatan laut sebagai sarana penghubung antarpulau maupun antarnegara.

Kesadaran yang tinggi tentang eksistensi dan kedaulatan bangsa maritim mencuat mencapai puncak ketika Perdana Menteri Ir. Djoeanda, mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia, yang dikenal sebagai "Deklarasi Djoeanda" pada 13 Desember 1957. Deklarasi Indonesia sebagai *Archipelagic State* ini setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya diterima dan ditetapkan di dalam konvensi hukum laut PBB (UNCLOS, 1982).

Namun, anehnya, setelah itu bangsa ini seperti menelantarkan potensinya sebagai negara kepulauan itu. Kekayaan yang terkandung di laut dan sepanjang garis pantai tak termanfaatkan dengan semestinya. Bahkan bangsa asing begitu leluasa menjarah ikan dan kekayaan laut dan pulau-pulau kecil Indonesia. Pulau Sipadan dan Ligitan pun terlepas dari pangkuan ibu pertiwi. Sementara nelayan-nelayan kita pun terpinggirkan dan terbelenggu dalam kemiskinan.

Syukur, reformasi membuahkan peningkatan kesadaran bangsa ini atas eksistensi jati dirinya sebagai bangsa maritim. Ditandai dengan lahirnya Departemen Kelautan dan Perikanan dan ditetapkannya Hari Nusantara 13 Desember. Adalah Presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 yang pertama kali mencanangkannya dan kemudian, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkannya melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001, tertanggal 11 Desember 2001 bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai Hari Nusantara, dan resmi sebagai hari perayaan Nasional.

Kini perhatian mulai dipusatkan ke arah potensi kelautan Nusantara. Presiden Megawati Soekarnoputri mencanangkan Gerbang Mina Bahari, di Teluk Tomini, 11 Oktober 2003 lalu. Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan, ini diharapkan mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa untuk mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan bagi kemajuan, kemakmuran dan kemandirian bangsa ini. Sehingga tak berlebihan bila hal ini disebut menjadi *trade mark* keberhasilan Kabinet Gotong Royong. Departemen Kelautan dan Perikanan diharapkan sebagai armada pengendali, penggerak dan pelaksana utama. Departemen ini dinakhodai seorang yang berkompeten di bidangnya. Orang yang sepanjang hidup dan keahliannya menyatu dengan kelautan. Dia, Rokhmin Dahuri yang pantas digelar sebagai '*pejuang kelautan dan perikanan*' yang profil dan pemikirannya kami tampilkan pada edisi ini.

Redaksi

122003





PRESIDEN MEGAWATI DIDAMPINGI MENTERI ROKHMIN DAHURI MENYERAHKAN PENGHARGAAN ■ e-tirto dtp

Hari Nusantara 2003

Presiden Megawati Sukarnoputri akan menghadiri puncak acara peringatan Hari Nusantara 2003 yang diselenggarakan di Terminal Merak Mas, Banten, Senin 15 Januari 2004. Presiden se usai menyampaikan pidato sambutan, selanjutnya bertatap muka dengan masyarakat nelayan/pembudidaya ikan dan masyarakat pelayaran rakyat dipandu Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. Selepas itu, Presiden menyerahkan beberapa penghargaan.

Selanjutnya Kepala Negara melepas *Joy Sailing*. *Joy sailing* ini melibatkan para siswa SMU, Pramuka Bahari dan masyarakat umum. Peringatan Hari Nusantara 2003 yang bertema "Daya Gunakan Potensi Ekonomi Maritim Untuk Kesejahteraan dan Kejayaan Bangsa Indonesia" ini juga diisi Parade Kapal diikuti sekitar 50 kapal yang terdiri dari pelayaran rakyat, perahu tradisional, kapal pengawas DKP dan kapal TNI-AL.

Acara juga diisi *Sea food festival (bazaar)*, yang dimaksud untuk mengampun-nyekan gemar makan ikan bagi masyarakat Indonesia, dan lebih mempertinggi gizi makanan. Kegiatan ini merupakan salah satu fokus kegiatan Gerakan Nasional Pembangunan Mina Bahari.

Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri

mengatakan tujuan peringatan Hari Nusantara ini adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang hidup di negara nusantara, yang terdiri atas pulau-pulau dan laut, sebagai negara bangsa maritim terbesar di dunia.

Selain itu, kata Rokhmin, peringatan Hari Nusantara tahun ini merupakan terompet untuk mengingatkan semangat bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kedaulatan wilayah Indonesia yang belakangan ini beberapa bagian wilayah kita sudah mulai diganggu oleh negara luar.

Peringatan ini juga merupakan gendang memanfaatkan potensi kemaritiman sudah di kumandangkan secara nasional sejak deklarasi Bunaken tahun 1999 di Manado, Seruan Sunda Kelapa tahun 2001 di Jakarta, dan tahun ini tepatnya tanggal 11 Oktober, Presiden Megawati Soekarno-putri mencanangkan Program Gerakan Nasional Mina Bahari (GMB) di teluk Tomini.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, Hari Nusantara tahun ini dijadikan momentum untuk mengembalikan kondisi ekonomi nasional berharap pada potensi yang terkandung di laut.

Sementara, sasaran

peringatan Hari Nusantara adalah tersosialisasinya prinsip-prinsip Indonesia sebagai Negara Nusantara (*Archipelagic State*), dengan berbagai peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahannya, melalui kegiatan peringatan di instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa atau kelurahan, sekolah-sekolah, masyarakat umum lainnya.

Deklarasi Djoeanda

Hari Nusantara ditetapkan 13 Desember melalui Keppres 126/2001. Hari ini dipilih mengingat 'Deklarasi Djoeanda' pada 13 Desember 1957 yang memaklumkan tentang wilayah laut Nusantara, yang pada intinya menyatakan batas-batas laut yang mengikatkan kepulauan Nusantara sebagai negara kesatuan, serta ditetapkannya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang mengakui prinsip-prinsip negara Kepulauan Nusantara (*archipelagic principles*).

Sejarah membuktikan pemanfaatan potensi laut Indonesia sudah sejak kerajaan Sriwidjaya (683 M-1030 M), Tetapi saat itu laut hanya dijadikan sebagai sarana penghubung antar pulau maupun antara negara. Laut dijadikan media transportasi bahan niaga ke pelbagai negara terutama ke wilayah Eropa.

Berangkat dari keputusan *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie*

(TZMKO), wilayah laut Indonesia, hanya 3 mil dari garis batas pantai pulau. Artinya, perairan diantara pulau-pulau yang jaraknya <3 mil adalah laut internasional. Wilayah teritorial Indonesia didasarkan TZMKO sangat kecil, dan banyak perairan laut Indonesia menjadi milik banyak negara.

Dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan tekad bulat memperjuangkan kedaulatan Indonesia, maka 13 Desember 1957, Perdana Menteri Ir. Djoeanda, mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia, yang dikenal sebagai "Deklarasi Djoeanda". Deklarasi dengan (prinsip-prinsip) negara Nusantara (*Archipelagic State*) ini meskipun mendapat tantangan dari beberapa negara besar, melalui perjuangan panjang, akhirnya diterima dan ditetapkan di dalam konvensi hukum laut PBB (UNCLOS, 1982) bahwa Indonesia adalah negara Kepulauan Nusantara.

Bertolak dari terbitnya deklarasi Djoeanda, maka pada tahun 1999 Presiden KH. Abdurrahman Wahid mencanangkan bahwa tanggal 13 Desember sebagai "Hari Nusantara". Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Desember 2001, Presiden RI, Megawati Soekarnoputri menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001, bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai Hari Nusantara, dan resmi sebagai hari perayaan Nasional, walaupun masih bersifat fakultatif.

"Bertolak pada kondisi sekarang banyak daerah ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perlu mengobarkan kembali semangat kebersamaan NKRI dan tetap mempertahankan kedaulatan negara kita melalui peringatan hari Nusantara. Momentum yang sangat tepat hari Nusantara tahun 2003 dijadikan terompet yang akan bergema sampai ke pelosok Sabang-Merauke," kata Menteri Rokhmin Dahuri. □ e-ti



MENTERI AGAMA SAID AGIL DIWAWANCARAI TOKOH INDONESIA DOTCOM ■ e-tiys

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR

Tekad 'Bapa' Penganut Agama

Ilmuan yang hafal Al Quran 30 Juz, mubaliq dan ustad serta tokoh muslim moderat ini mengatakan, kerukunan adalah modal utama untuk keberhasilan. Dan, agama adalah jalur paling efektif untuk mewujudkan kerukunan. Sebagai seorang akademisi dengan kedalaman pemahaman agama, ia dipercayakan menjabat Menteri Agama Kabinet Gotong-Royong. Ia pun siap dan bertekad mengemban amanah itu menjadi 'bapa' penganut agama di negeri berpenduduk lebih 200 juta jiwa dan terdiri dari berbagai agama ini.

Doktor (Ph.D) lulusan Fakultas Syari'ah Universitas Ummu Al Qura Makkah Saudi Arabia (1987), ini mengatakan agama memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Agama juga menjadi benteng spiritual dan moral. Cirinya adalah setiap bertindak selalu berangkat dari basis hati nurani. Setiap langkah dan melakukan sesuatu harus bertanya kepada hati nurani yang didasari oleh ajaran agama yang dianutnya.

Jika tidak ada kerukunan, akan muncul konflik yang merugikan semua orang, kelompok dan golongan. Hal inilah yang terus disosialisasikannya. Bukan hanya

menciptakan kerukun-an semu, tetapi mena-namkan sikap melalui jalur agama bahwa "kamu bahagia saya bahagia, kamu menderi-ta saya juga menderita."

Ia tak pernah membayangkan akan menjadi seorang menteri. Tapi takdir perjalanan hidupnya telah mengantarkannya menjabat Menteri Agama. Menurutnya, dari aspek agama, penyebab terjadinya perpecahan dan konflik di negeri ini adalah karena kedangkalan pemahaman tentang agama. Keagamaan hanya dipahami dangkal sebagai upacara ritual semata, sehingga orangnya tidak memiliki sikap toleransi. Tapi orang yang mengenal agamanya secara mendalam, akan memiliki sikap toleransi dan tidak merasa benar sendiri.

Sehubungan dengan itu, Menteri Agama Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA dalam percakapan dengan Wartawan Tokoh Indonesia DotCom di kamar kerjanya memaparkan Tri Program Inti Departemen Agama, sebagai tindak lanjut enam program pokok

Kabinet Gotong Royong. Pertama, terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadaban luhur,

berbasis hati nurani, yang disinari oleh ajaran agamanya.

Kedua, terhindarnya perilaku radikal, ekstrim, tidak toleran dan eksklusif dalam kehidupan beragama, sehingga terwujud masyarakat yang rukun, damai dalam kebersamaan dan ketenteraman. Ketiga, terbinanya masyarakat agar menghayati, mengamalkan ajaran agama dengan sebenarnya, mengutamakan persamaan, menghormati perbedaan melalui internalisasi ajaran agama.

Selain itu, bahwa bangsa Indonesia pernah dikenal sebagai masyarakat yang santun dan ramah. Namun belakangan menjadi masyarakat yang menyukai kekerasan, mudah marah, agresif dan melakukan tindakan-tindakan anarkis. Marah sedikit lalu membakar. Marah sedikit lalu memukul dan membunuh orang.

Ada apa ini? Maka dengan itu perlu dilakukan sebuah upaya untuk mencegah masyarakat ini agar terhindar dari berbagai bentuk radikalisme, perilaku radikal, ekstrim, perilaku yang tidak toleran. Melainkan memiliki sikap yang menghormati perbedaan, senantiasa dalam kebersamaan. □ e-ti

CIPUTRA

Si Pengembang

Keran KPR yang mulai mengucur membuat aktivitas PT Ciputra Development terdengar lagi. Kelompok usaha ini semakin giat beriklan. Akankah Ciputra segera berjaya kembali? Akibat krisis ekonomi yang melanda negeri ini, sebagaimana kebanyakan pengusaha properti lainnya, Ciputra pun harus melewati masa krisis dengan kepahitan. Padahal, serangkaian langkah penghematan telah dilakukan. Grup Ciputra (GC), misalnya, terpaksa harus memangkas 7 ribu karyawannya, dan yang tersisa cuma sekitar 35%.

Lantas, semua departemen perencanaan di masing-masing anak perusahaan segera ditutup dan digantikan satu design center yang bertugas memberikan servis desain kepada seluruh proyek. Jenjang komando 9 tingkat pun dipotong menjadi 5. Akibatnya, banyak manajer kehilangan pekerjaan. Lebih pahit lagi: kantor pusat GC yang semula berada di Gedung Jaya, Thamrin, Jakarta Pusat, terpaksa pindah ke Jl. Satrio — kompleks perkantoran milik GC. Paling tidak, dengan cara semacam itu, GC bisa menghemat Rp 4 miliar/tahun.

Sementara Harun dan tim keuangannya — setelah susut menjadi 7 orang dan gajinya dipotong hingga 40% — hangkang ke salah satu lantai Hotel Ciputra, Grogol, Jakarta Barat. Di tempat itu, mereka menyewa beberapa ruangan. Selebihnya, kabar yang menjadi rahasia umum: utang GC macet total. Menurut Harun, para petinggi CD waktu itu sadar betul kondisi yang ada tidak bakal berubah secepat yang dibayangkan. Soalnya, berlalunya krisis moneter yang belakangan bermetamorfosis menjadi krisis multidimensional sejatinya berada di luar kendali mereka. Celah yang masih terbuka hanyalah konsolidasi internal dan restrukturisasi perusahaan. □ e-ti



ALBERT HASIBUAN

Garam Aneka Profesi



Pria yang lugas dan sabar ini mengumpul banyak profesi. Mulai dari dosen, advokat, politisi, pemimpin surat kabar, aktivis HAM dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Konstitusi. Dalam aneka profesi dan bidang tugas itu, ia selalu memberikan kontribusi yang berguna laksana garam, yang memberi rasa dan mengawetkan (mencegah kebusukan) tanpa menonjolkan sosok dirinya. Ia seorang profesional yang tak mengenal batas lingkup pengabdian.

Di lembaga Mahkamah Konstitusi yang baru dibentuk tahun 2003, mantan anggota MPR/DPR, ini bersama rekan-rekannya bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak 5 November 2003, Komisi Konstitusi ini menerima masukan atau aspirasi masyarakat melalui email ataupun surat.

Pria cerdas yang sederhana ini lahir di Bandung, Jawa Barat, 25 Maret 1939. Ia menamatkan pendidikan dasar hingga SLTA di Jakarta. Selanjutnya Albert melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) tamat tahun 1966. Dari sana, Albert menjadi pengacara/advokat. Ia eksponen Angkatan '66 yang turut berjuang mengganyang PKI dan

menumbangkan Orde Lama.

Sebenarnya, waktu kecil, orang Batak yang lahir di Bandung dan besar di Jakarta ini bercita-cita menjadi penerbang. Tetapi, ibu dan ayahnya menganggap profesi penerbang itu berbahaya. Akhirnya, ia memang beralih ke bidang hukum. Minatnya pada ilmu hukum dimulai saat ia duduk di SMA dan ketika mendapatkan pelajaran tata hukum. "Ilmu hukum berhubungan dengan aturan dan yang harus diatur, agar tercipta ketertiban. Ini menarik dipelajari," ujar sulung dari tiga bersaudara itu.

Begitu tamat dari FH UKI, ia mengajar di almamaternya, UKI. Tahun 1968, bekas komandan Yon Yani Laskar Ampera Arief Rachman Hakim ini membuka Biro Bantuan Hukum bersama beberapa kawannya. Pada 1971, bersama Adnan Buyung Nasution, ia mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Saat itu, Buyung yang menjadi Ketua, sementara Albert sekretaris. Tapi kemudian, ia mendirikan kantor pengacara sendiri di Jakarta Pusat. Tahun 1972 ia menjadi anggota MPR. Kemudian, pada 1977, ia menjadi anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan dan terus terpilih hingga empat periode berturut-turut.

Namanya sebagai pengacara/advokat

TokohIndonesia DotCom

Kisah selengkapnya para tokoh di Berita Tokoh ini tersaji di website www.tokohindonesia.com atau www.e-ti.com

the experience site

THE EXPERIENCE SITE

KEMAHU TOKOH
SEBELUM DIPILAH

TokohIndonesia.com
TokohIndonesia.com
TokohIndonesia.com



DISKUSI DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN KEMAHU

kemudian melambung. Ia juga menangani kasus-kasus yang masuk dalam kategori besar dan kontroversial. Ia pernah menjadi pembela Rewang, tokoh PKI, dan Oei Tjoe Tat, seorang menteri masa Soekarno yang diseret ke pengadilan. □ **e-ti**

Ibarat mutiara ditaruh di mana pun akan tetap berkilau dan bercahaya. Begitu pula seseorang yang berorientasi pada tugas dan selalu mendahulukan kewajiban akan bercahaya di mana pun ditempatkan. Prinsip mendahulukan kewajiban itu tercermin dalam kisah Dr Achmad Sujudi, MHA, Menteri Kesehatan RI. Prinsip ini telah diasuhkan oleh ayahnya sejak kecil.

Bangsa ini, dalam beberapa tahun terakhir, tengah mengalami berbagai kesulitan. Kalau saja semua orang di Indonesia berpikir mengutamakan kewajiban, mungkin keadaan bangsa tidak akan terlalu berat seperti ini. Sayangnya, mengutamakan kewajiban, bagi banyak orang saat ini, malah bisa saja menjadi tertawaan. Saat ini banyak orang berteriak-teriak memperjuangkan mendahulukan hak-haknya. Namun bukan berarti saat ini tidak ada orang, termasuk generasi muda, yang mengutamakan kewajiban. Bahkan mungkin masih

ACHMAD SUJUDI

Prinsip Dahulukan Kewajiban



ACHMAD SUJUDI ■ e-tiyusak

banyak. Mereka ini, para peraih sukses yang sangat dibutuhkan bangsa.

Berikut ini, sebuah kisah perjalanan hidup seorang anak bangsa, yang dididik orang tuanya untuk selalu mendahulukan kewajiban. Ia, Dr. Achmad Sujudi, MHA, pria yang lahir pada tanggal 11 April 1941 di kota kecil Bondowoso – sebuah ibukota kabupaten di Jawa Timur, yang memiliki populasi yang sangat kecil. Ayahnya,

Musdari Darmoprawiro dan ibunya Kusniati, bekerja sebagai guru Sekolah Rakyat (SR) di Bondowoso.

Lahir dan dibesarkan dalam keluarga guru, telah menempanya menjadi seorang terpelajar, berdisiplin, berakhlak, sederhana dan mendahulukan kewajiban. Ia mulai bersekolah di SR Bondowoso, masuk langsung duduk di kelas 3. Sebab sebelumnya ia sudah diajar oleh ibunya di rumah.

Bersamaan dengan belajar di sekolah formal, ia juga dididik di lingkungan madrasah dan pesantren. Bagi ayahnya hal ini penting, agar anak-anaknya berhasil di dunia dan akhirat. Prinsip hidup yang utama dan dan paling ditekankan orang tuanya adalah lakukan terlebih dahulu kewajibanmu. Mendahulukan kewajiban.

"Jika kamu melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh, maka hak-hak akan mengikuti," nasehat Sang Ayah, yang kini telah berusia 95 tahun. Pesan dan prinsip ini akhirnya menyatu dalam kehidupan keluarga ini. Tak terkecuali bagi Achmad Sujudi. Ia benar-benar menghayati dan mengamalkan prinsip itu dalam kehidupannya sehari-hari.

Semenjak kecil ia dilatih dan dididik untuk melakukan kewajiban baik di sekolah dengan belajar sungguh-sungguh, maupun kepada orang tua, guru, teman dan lingkungan. Prinsip itu sangat mendasar dan mendalam baginya. Sebab ia meyakini prinsip itu betul. □ **e-ti**



PRESIDEN SOEKARNO, KARYA BASUKI ABDULLAH ■ koleksi bung karno

BUNGKARNO

BERDIRI DI ATAS KAKI SENDIRI

Soekarno (Bung Karno) Presiden Pertama Republik Indonesia, 1945- 1966, menganut ideologi pembangunan 'berdiri di atas kaki sendiri'. Proklamator yang lahir di Blitar, Jatim, 6 Juni 1901 ini dengan gagah mengejek Amerika Serikat dan negara kapitalis lainnya: *"Go to hell with your aid."* Persetan dengan bantuanmu.



Ia mengajak negara-negara sedang berkembang (baru merdeka) bersatu. Pemimpin Besar Revolusi ini juga berhasil menggelorakan semangat revolusi bagi bangsanya, serta menjaga keutuhan NKRI.

Tokoh pencinta seni ini memiliki slogan yang kuat menggantungkan cita-cita setinggi bintang untuk membawa rakyatnya menuju kehidupan sejahtera, adil makmur. Ideologi pembangunan yang dianut pria yang berasal dari keturunan bangsawan Jawa (Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, suku Jawa dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, suku Bali), ini bila dilihat dari buku *Pioneers in Development*, kira-kira condong menganut ideologi pembangunan yang dilahirkan kaum ekonom yang tak mengenal kamus bahwa membangun suatu negeri harus mengemis kepada Barat. Tapi bagi mereka, haram hukumnya meminta-minta bantuan asing. Bersentuhan dengan negara Barat yang kaya, apalagi sampai meminta bantuan, justru mencelakakan si melarat (negara miskin).

Bagi Bung Karno, yang ketika kecil bernama Kusno, ini tampaknya tak ada kisah manis bagi negara-negara miskin yang membangun dengan modal dan bantuan asing. Semua tetek bengek manajemen pembangunan yang diperbantukan dan arus teknologi modern yang dialihkan — agar si miskin jadi kaya dan mengejar Barat — hanyalah alat pengisap kekayaan si miskin yang membuatnya makin terbelakang.

Itulah Bung Karno yang berhasil menggelorakan semangat revolusi dan mengajak berdiri di atas kaki sendiri bagi bangsanya, walaupun belum sempat berhasil membawa rakyatnya dalam kehidupan yang sejahtera. Konsep "berdiri di atas kaki sendiri" memang belum sampai ke tujuan tetapi setidaknya berhasil memberikan kebanggaan pada eksistensi bangsa. Daripada berdiri di atas utang luar negeri yang terbukti menghadirkan ketergantungan dan ketidakberdayaan (neokolonialisme).

Masa kecil Bung Karno sudah diisi semangat kemandirian. Ia hanya beberapa tahun hidup bersama orang tua di Blitar. Semasa SD hingga tamat, ia tinggal di Surabaya, indeksos di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan di HBS (*Hoogere Burger School*). Saat belajar di HBS itu ia pun telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, ia pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THS (*Technische Hoogeschool* atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar "Ir" pada 25 Mei 1926.

Kemudian, ia merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI

(Partai Nasional Indonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, si penjajah, menjebloskannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul 'Indonesia Menggugat', dengan gagah berani ia menelanjangi kebobrokan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu.

Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas (1931), Bung Karno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, ia kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, ia juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan ia berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik sangat hebat. Ia pun tak mau membubarkan PKI yang didukung oleh mahasiswa dan TNI sebagai dalang kekejaman pembunuh para jenderal itu. Suasana politik makin kacau. Sehingga pada 11 Maret 1966 ia mengeluarkan surat perintah kepada Soeharto untuk mengendalikan situasi, yang kemudian dikenal dengan sebutan Supersemar. Tapi, inilah awal kejatuhannya. Sebab Soeharto menggunakan Supersemar itu membubarkan PKI dan merebut simpati para politisi dan mahasiswa serta 'merebut' kekuasaan.

MPR mengukuhkan Supersemar itu dan menolak pertanggungjawaban Soekarno serta mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

Kemudian Bung Karno 'dipenjarakan' di Wisma Yaso, Jakarta. Kesehatannya terus memburuk. Akhirnya, pada hari Minggu, 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Paduka Yang Mulia Pemimpin Besar Revolusi ini meninggalkan 8 orang anak. Dari Fatmawati mendapatkan lima anak yaitu Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan Guruh. Dari Hartini mendapat dua anak yaitu Taufan dan Bayu. Sedangkan dari Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mendapatkan seorang putri yaitu Kartika.

Orator Ulung

Presiden pertama RI itu pun dikenal sebagai orator yang ulung, yang dapat berpidato secara amat berapi-api tentang revolusi nasional, nekolonialisme dan imperialisme. Ia juga amat percaya pada kekuatan massa, kekuatan rakyat.

"Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, aku berjuang karena rakyat dan aku penyambung lidah rakyat," kata Bung Karno, dalam karyanya 'Menggali Api Pancasila'. Suatu ungkapan yang cukup jujur dari seorang orator besar.

Gejala berbahasa Bung Karno merupakan fenomena langka yang mengundang kagum banyak orang. Kemahirannya menggunakan bahasa dengan segala macam gayanya berhubungan dengan kepribadiannya. Hal ini tercermin dalam autobiografi, karangan-karangan dan buku-buku sejarah yang memuat sepak terjangnya.

Ia adalah seorang cendekiawan yang meninggalkan ratusan karya tulis dan beberapa naskah drama yang mungkin hanya pernah dipentaskan di Ende, Flores. Kumpulan tulisannya sudah diterbitkan dengan judul "Dibawah Bendera Revolusi", dua jilid. Jilid pertama boleh dikatakan paling menarik dan paling penting karena mewakili diri Soekarno sebagai Soekarno.

Dari buku setebal kira-kira 630 halaman tersebut tulisan pertama yang bermula dari tahun 1926, dengan judul "Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme" adalah paling menarik dan mungkin paling penting sebagai titik-tolak dalam upaya



SI DENOK, KARYA M.PASTORI (SWISS) ■ koleksi bung karno

memahami Soekarno dalam gelora masa mudanya, seorang pemuda berumur 26 tahun.

Di tengah kebesarannya, sang orator ulung dan penulis piawai, ini selalu membutuhkan dukungan orang lain. Ia tak tahan kesepian dan tak suka tempat tertutup.

Di akhir masa kekuasaannya, ia sering merasa kesepian. Dalam autobiografinya yang disusun oleh Cindy Adams, *Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat* itu, bercerita. "Aku tak tidur selama enam tahun. Aku tak dapat tidur barang sekejap. Kadang-kadang, di larut malam, aku menelepon seseorang yang dekat denganku seperti misalnya Subandrio, Wakil Perdana Menteri Satu dan kataku, 'Bandrio datanglah ke tempat saya, temani saya, ceritakan padaku sesuatu yang ganjil, ceritakanlah suatu lelucon, berceritalah tentang apa saja asal jangan mengenai politik. Dan kalau saya tertidur, maafkanlah.... Untuk pertama kali dalam hidupku aku mulai makan obat tidur. Aku lelah. Terlalu lelah."

Dalam bagian lain disebutkan, "Ditinjau secara keseluruhan maka jabatan presiden tak ubahnya seperti suatu pengasingan yang terpencil... Seringkali pikiran oranglah yang berubah-ubah, bukan pikiranmu... Mereka turut menciptakan pulau kesepian ini di sekelilingmu." □ **e-ti/tian**, dari berbagai sumber.



PERSIAPAN GERILYA, KARYA DULLAH ■ koleksi bung karno



ROKHMİN DAHURI

Inilah sosok seorang pejuang kelautan dan perikanan. Sejak kecil, hidupnya sudah menyatu dengan laut, nelayan dan ikan. Gelar doktornya juga tak terlepas dari masalah pengelolaan sumberdaya lautan. Ia juga seorang yang gigih memperjuangkan terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), yang kini dipimpinnya. Ia dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu 18/1/03. Ia seorang tokoh muda yang pantas dijadikan idola dan teladan. Kisah dan pandangan hidupnya adalah guru yang baik bagi orang lain.

Penampilannya sederhana. Ia ramah dan terbuka. Sosok yang mencerminkan filosofi hidupnya: *Pertama*, menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama umat manusia dan semesta alam; *Kedua*, bekerja keras dan profesional; dan, *Ketiga*, hidup dekat dengan Tuhan. Filosofi itu dianutnya sejak kecil sampai sekarang, dan mudah-mudahan sampai hayat di kandung badan.

Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, MS ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama dan semesta alam. Itu filosofi hidupnya yang pertama. Bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta untuk seluruh dunia. Sekurangnya ia merasa boleh bercita-cita demikian. Walau sesungguhnya, hal itu bukan lagi sekedar falsafah atau cita-cita. Sebab dalam usia masih relatif

muda, 42 tahun, ia sudah mengabdikan dalam jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tak mustahil, suatu ketika ia bisa menjabat di sebuah lembaga dunia, seperti di PBB. Sehingga ia makin bermanfaat bagi dunia sekaligus

menjadi sedih jika di tengah bangsa ini banyak sekali aktor yang ingin hidup enak tanpa kerja keras. Banyak makelar, broker dan pemburu keuntungan tanpa bekerja keras. Hanya mau menjadi calo. Kondisi seperti ini akan membuat suatu bangsa hancur.

"Seharusnya kita menjadi orang yang bekerja keras, profesional dan bertekad menjadi yang terbaik di bidangnya," ujarnya ketika berbincang dengan wartawan TokohIndonesia DotCom di ruang kerjanya.

Ketiga, hidup dekat dengan Tuhan. Karena ridho Tuhan, ia yang tidak memiliki latar belakang politik, non partai, dapat menjadi seorang menteri. Ia memang dari kecil sudah belajar

untuk menjadi orang yang dekat Tuhan. Ia yang hanya anak seorang nelayan tradisional telah memperoleh ridho Allah mengecap pendidikan hingga meraih

Kita menjadi sedih jika di tengah bangsa ini banyak sekali aktor yang ingin hidup enak tanpa kerja keras. Banyak makelar, broker dan pemburu keuntungan tanpa bekerja keras.

mengharumkan nama baik bangsanya.

Kedua, menjadi orang yang bekerja keras dan profesional. Berpijak dari pandangan hidup ini, ia mengaku



PEJUANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

gelar doktor bidang Ilmu Ekologi dan Pengelolaan Sumber-daya Wilayah Pesisir dan Lautan dari *School for Resources and Environmental Studies Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia Canada*, serta menjadi menteri.

Dengan ketiga filosofi hidup itu, sesungguhnya ia juga telah melakukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, yang belakangan banyak dipublikasikan. Ia tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, yang sebenarnya hanya terbatas 20% dalam hidup ini. Tetapi juga kecerdasan emosional yaitu kemampuan untuk mengelola emosi dan motivasi. Seperti keadaan ketika malas atau ingin marah dan frustrasi yang sebenarnya berlangsung sebentar.

Banyak orang yang lebih hebat, mendapat peringkat *cumlaude*, secara intelektual hebat, namun sedikit yang memberikan kontribusi bagi pekerjaannya. Menurutnya, untuk mengatasi ini, jangan menganggap diri orang yang paling pintar sendiri. Tapi harus pintar untuk menempatkan diri. Kapan harus menunjukkan kepintaran. Kapan harus menjadi seorang pemimpin atau dengan rela menjadi seorang yang siap untuk mendengarkan orang lain dan menjadi orang yang dipimpin. Siap menjadi pemimpin dan siap menjadi anak buah.

Sikap seperti ini sering kali dilakonkannya, sebagaimana dituturkan beberapa orang yang sudah lama mengenalnya. Seperti ketika pertama kali ia masuk ke lingkungan DPR/MPR, sebagai pendatang baru dalam dunia politik, ia terlihat banyak belajar dan menjadi anak buah. Tetapi ketika berbicara bidang kelautan ia dengan bijak (tidak menyakitkan orang) mampu menunjukkan bahwa ia terbaik di bidang itu. Jadi ia melengkapi kecerdasan intelektualnya dengan kecerdasan emosional.

Kemudian, kecerdasan spiritual yaitu kemampuan dekat dan bertaqwa kepada Tuhan. Setelah berkerja keras, berdoa dan berbuat sebaik mungkin, namun dari hasil yang diharapkan 100 lalu hanya mendapat 50, itu harus diterima sebagai takdir Tuhan Allah. Kalau hasil yang dicapai tidak terlihat saat ini, mungkin 2 atau 3 bulan ke depan, siapa tahu?

Dengan pandangan hidup tersebut, penganut agama Islam ini, juga mengharamkan politik belah bambu: Mengangkat ke atas dan memijak ke bawah. Dalam meniti karirnya, ia berupaya menjalin *networking* yang baik, termasuk dengan media massa. Ia telah merasakan pentingnya media massa sebagai *networking* ketika di



IPB. "Saya menjadi populer dalam bidang kelautan melalui media massa," ungkap lulusan Sarjana Perikanan (1982) dan Magister Sains Bidang Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (1986) ini dengan jujur.

Sementara mengenai visi dan misi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ia menekankan perlu kesadaran hidup bersaudara, kemampuan bekerja sama, saling menghargai, mengasihi satu dengan yang lain. Ia melihat di bangsa kita belakangan ini kemampuan itu semakin langka, sehingga muncul banyak konflik, seperti Aceh, Ambon, Sampit dan lain-lain.

Menurutnya, penafsiran bahwa semangat jihad itu diartikan sebagai cara untuk menyerang umat lain, itu salah! Tapi jihad itu seharusnya ditafsirkan sebagai semangat untuk menolong orang lain. Ia yakin seluruh agama mengajarkan manusia untuk hidup sebagai rahmat dan kebaikan bagi orang lain. Namun keadaannya mengapa berbeda? Itu karena ada orang-orang tertentu yang ingin populer dengan menggunakan istilah-istilah, jargon-jargon dan bendera agama.

Penerima piagam penghargaan Dosen Teladan I Tingkat Nasional (1995) dan *Indonesian Development Award* (1999) ini mengatakan, musuh terbesar umat manusia adalah mengadu domba antarumat manusia. "Kita harus bisa melihat bahwa kehidupan beragama adalah urusan pribadi kita sedangkan di sisi lain kita juga punya kewajiban dalam kehidupan sosial yang perlu dilakukan."

Ia percaya bila hal itu dilakukan, bangsa ini akan melangkah kepada kehidupan yang produktif, penuh inovasi dan kreatifitas. Bahkan bangsa ini dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. "Jika kita ingin dihargai oleh bangsa lain, kita sendiri harus terlebih dahulu menghargai bangsa sendiri, dengan cara penegakan hukum, penanggulangan KKN dan lain-lain," kata ayah dari Sri Minawati, Muthia Ramdhini, Rahmania Kannesia dan Sylvana Afiati, buah kasih dengan isterinya Ir Pigoselpi Anas, MSi.

Sebelum menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin termasuk salah seorang yang gigih mendukung dan memperjuangkan terbentuknya departemen ini. Sebelum Pemilu 1999, ia dipanggil DPR untuk memaparkan bidang ini. Begitu juga ketika departemen ini pertama kali dibentuk dalam Kabinet Persatuan Gus Dur -- menteri pertamanya Sarwono Kusumaatmadja, Rokhmin menjabat

ROKHMIN DAHURI DAN ISTERI ■ *Awang kel*

sebagai Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan sempat dua bulan menjabat menteri -- ia selalu berupaya meyakinkan bahwa bidang ini adalah penting.

Saat menjabat Dirjen, ia pernah hampir satu setengah jam memaparkan di hadapan Megawati Sukarnoputri (Wakil Presiden) betapa pentingnya sektor kelautan dan perikanan ini dikembangkan. Hal ini pula, yang dikemukakan Megawati ketika meneleponnya untuk siap membantu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Kabinet Gotong-Royong. Presiden Megawati juga tahu bahwa ia anak nelayan asli yang memiliki perhatian terhadap nasib nelayan.

Anak Nelayan

Ayahnya, H Dahuri Ismail adalah nelayan tradisional. Sementara ibunya, Hj Dasmirah adalah pedagang ikan di pasar.

Sepanjang hidupnya, pria yang lahir di kampung nelayan Gebang Ilir, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, 16 Nopember 1958, ini selalu berhubungan dengan nelayan, lautan dan ikan. Aktivitas masa kanak-kanaknya sampai remaja selalu penuh dengan urusan laut dan ikan. Ia ikut membantu orangtuanya menangkap ikan di laut, mengasinkan ikan dan menjualnya di pasar Cirebon, Kuningan, Bandung dan Bogor.

Maka, sebagai anak nelayan, perhatian Rokhmin terhadap nelayan dan laut amat besar. Wajar bila sejak kecil ia pun bertekad membangun bidang kelautan dan perikanan. Pada tempatnya pula bila ia dipercaya memimpin DKP. Sebelum menjabat menteri, di almamaternya, ia memimpin Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB (1996-1999). Selain itu, sejak 1997 sampai sekarang masih menjabat Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Program Pascasarjana IPB, yang didirikannya.

Pada tahun 1996, bersama Prof Jacob Rais, Ir Sapta Putra Ginting dan Dr MJ Sitepu, ia menulis buku Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Lalu tahun 2000 ia sendiri menulis buku Pendayagunaan Sumberdaya

Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat. Bahkan di tengah kesibukannya sebagai menteri, ia masih sempat mempublikasikan dua buku yakni berjudul 'Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan dan Kelautan (LISPI, Jakarta, 2002) dan 'Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia' (Gramedia, Jakarta, 2003).

Serta dalam berbagai kesempatan di dalam dan di luar negeri menyampaikan

penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Ia juga yang gigih memperjuangkan perlindungan terhadap sumber daya ikan tuna. Untuk itu, ia menyarankan agar Indonesia masuk Komisi Internasional tentang Tuna.

Penerobos Ekonomi

Menurut Rokhmin, Presiden Megawati sesungguhnya mengharapkan ada sektor lain yang menjadi penghela dan penerobos kebekuan ekonomi. Maka dalam kaitan ini, ia berpendapat perlu dilakukan reorientasi kebijakan ekonomi makro yang lebih memberi perhatian pada pengembangan industri

berbasis sumber daya, yang memang merupakan keunggulan Indonesia.

Reorientasi tersebut, menurut Rokhmin, didasarkan pada fakta fisik, bahwa dua per tiga wilayah Indonesia berupa laut dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan terdiri dari sekitar 17.506 pulau. Kondisi wilayah ini mengandung sumber daya alam yang sangat besar, baik sumber daya yang tidak dapat pulih maupun yang dapat pulih.

Sumber daya alam di laut yang tidak dapat pulih antara lain adalah minyak, gas, mineral dan energi laut nonkonvensional (*Ocean Thermal Energy Convention/OETC*), serta harta karun yang saat ini sudah mulai digali walaupun masih sangat terbatas. Sumber daya laut yang dapat pulih adalah berupa ikan, yang potensi lestarnya diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun, yang saat ini baru dimanfaatkan sekitar 65%. Garis pantai yang demikian panjangnya jelas mempunyai potensi yang sangat besar untuk budidaya laut dan budidaya air payau, yang saat ini juga masih terbatas pemanfaatannya.

Sementara itu, laut juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain dalam bentuk jasa, misalnya industri wisata bahari, kawasan konservasi, transportasi laut, yang di masa mendatang akan semakin besar peranannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diyakini pula bahwa laut juga dapat berfungsi dominan sebagai media pemersatu dan sekaligus perekat

Musuh terbesar umat manusia adalah mengadu domba antarumat

makalah yang menyangkut masalah kelautan dan perikanan. Selain itu, ia juga sering kali mengikuti pelatihan, seminar, workshop dan kegiatan

BIODATA

NAMA:
Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS

LAHIR:
Cirebon, 16 Nopember 1958

AGAMA:
Islam

ISTERI:
Ir Pigoseipi Anas, MSI

ANAK:
Sri Minawati, Muthia Ramdhini, Rahmania Kannesia dan Sylvana Afiati.

AYAH:
H. Dahuri Ismail

IBU:
Hj. Dasmirah

JABATAN:
1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI
2. Dosen PS-SPL IPB (Sumberdaya Pesisir dan Lautan)

PENDIDIKAN:
1991 Ph.D dari School for Resources and Environmental Studies Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia Canada.
Bidang Ilmu Ekologi dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan,

1986 Magister Sains (MS) dari Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bidang Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

1982 Sarjana Perikanan (Ir.) dari Fakultas Perikanan IPB. Bidang Ilmu Manajemen Sumberdaya Perairan.

JABATAN STRUKTURAL:
1992-1995 Kepala Program Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB.
1996 -Des' 99 Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Lembaga Penelitian, IPB.

1997 -1998 Pembantu Dekan I Fakultas Perikanan IPB.

1997-sekarang Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir & Lautan, Program Pascasarjana IPB

1998- Des' 99 Pembantu Rektor IV-IPB
Des '99-Jun '01 Dirjen Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan
Jun' 01-sekarang Menteri Kelautan dan Perikanan

BAHASA ASING:
Inggris Aktif

PIAGAM PENGHARGAAN
1995 Dosen Teladan I Tingkat Nasional
1999 Indonesian Development Award 1999

kesatuan bangsa, yang pada saat ini menunjukkan gejala disintegrasi.

Argumen lain bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu penghela *recovery* ekonomi adalah kenyataan bahwa permintaan terhadap produk perikanan meningkat secara signifikan, baik karena peningkatan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, juga yang lebih penting adalah terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat dari *red meat* ke *white meat*. Perubahan itu sendiri terjadi karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

Di samping itu, banyak negara lain yang maju karena pembangunan kelautan dan perikanan dikelola dengan baik dan mendapat dukungan pemerintah. Islandi, Norwegia dan Thailand adalah beberapa dari contoh sukses pembangunan perikanan dan kelautannya. Padahal Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang lebih besar dan kaya ketimbang negara-negara tersebut.

Dengan gambaran potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut, maka salah satu *entry point* untuk memulai dan melangsungkan pembangunannya adalah pengembangan investasi di sektor ini, yang diyakini dapat menjadi industri kelautan yang kuat dan terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Paling tidak terdapat 5 (lima) kelompok industri kelautan yakni (1) industri mineral dan energi laut, (2) industri maritim termasuk industri galangan kapal, (3) industri pelayaran, (4) industri pariwisata, dan (5) industri perikanan.

Berdasarkan pendekatan pembangunan industri yang terpadu, 5 (lima) kelompok industri kelautan tersebut memiliki saling keterkaitan satu dengan lainnya, yakni (1) sebagian dari konsumen industri mineral/energi dan industri maritim adalah industri perikanan, pelayaran dan pariwisata, (2) sebagian dari konsumen industri pelayaran adalah industri perikanan dan pariwisata, dan (3) sebagian dari konsumen industri perikanan adalah industri pariwisata.

Dalam kerangka ini maka industri perikanan dapat

diprojektikan sebagai salah satu lokomotif pembangunan keempat industri kelautan lainnya. Artinya apabila industri perikanan berkembang akan dapat menarik pertumbuhan keempat industri lainnya. Maka, untuk membangun industri kelautan yang tangguh diperlukan industri perikanan yang kuat.

Sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu penghela *recovery* ekonomi.

Dengan pemikiran tersebut, sudah sewajarnya apabila pembangunan perikanan menjadi *prime mover* dalam sektor ini. Lebih-lebih dalam situasi krisis ekonomi, usaha perikanan mampu bertahan, bahkan dapat menyumbangkan penerimaan devisa negara, utamanya usaha perikanan yang menghasilkan komoditas ekspor.

Tantangan

Permasalahan utama yang dihadapi dalam memimpin departemen yang belum berusia lima tahun ini adalah terletak pada tingkat SDM yang lemah dan infrastruktur yang kurang. Hal ini karena selama ini bidang kelautan dan perikanan hanya dilihat sebelah mata.

Kendala yang mendasar lainnya adalah pandangan masyarakat terhadap hasil-hasil makanan laut. Seperti di masyarakat kita ada pameo yang mengatakan "jangan makan ikan nanti bisa cacingan." Padahal itu salah dan perlu diubah.

Kendala yang tak kalah rumitnya adalah masalah penegakan hukum, seperti kasus pencurian ikan. Untuk mengatasi hal ini ia harus bijaksana merangkul dan berkordinasi dengan instansi lain. Ia juga menyerahkan masalah ini kepada komponen hukum.

Yang berikutnya adalah kendala pendanaan, keadaan perbankan mempengaruhi untuk peningkatan investasi.

Permasalahan dan kendala dalam implementasi pembangunan kelautan dan perikanan itu lebih lengkap dan jelas telah diuraikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2001-2004 DKP. Permasalahan dan kendala itu diklasifikasikan ke dalam dua tingkatan, yaitu: (1) Masalah mikroteknis, yakni masalah yang muncul dan disebabkan oleh kondisi internal pembangunan perikanan dan kelautan, dan (2) Makrostruktural (kebijakan ekonomi makro yang kurang kondusif) yakni masalah yang muncul dan disebabkan oleh kondisi eksternal baik ekonomi makro, politik, hukum dan kelembagaan.

Untuk menanggulangi kasus-kasus kelautan ini, ia melakukan langkah-langkah menyangkut soal perizinan (memperketat perizinan), keamanan laut mencakup kesejahteraan nelayan dan pengadilan (penegakan hukum).

Visi dan Misi

Selain itu, dalam Renstra 2001-2004 DKP, juga dirumuskan visi Pembangunan Kelautan dan

ORGANISASI PROFESI

- * Anggota Dewan Riset Nasional (DRN)
- * Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara
- * Ketua Umum Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia
- * Sekretaris Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia
- * Anggota "ICLARM Network of Tropical Fisheries Scientist"
- * Anggota Coastal Area Management and Planning Network, The University of Rhode Islands, USA
- * Coordinator of Coastal Zone Management Network for Asia-Pacific Region, UNEP
- * Anggota Tim Editor "Coastal Management in Tropical Asia Newsletter", Coastal Resources Center, University of Rhode Island.
- * Ketua Tim Teknis Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, RI.
- * Anggota International Resource Modelling Association, USA.
- * Anggota Tim Editor "Book on Coastal Zone Management in Asia-Pacific", Japanese International Marine Science and Technology Federation, Tokyo.
- * Anggota Roster of Experts on Marine and Coastal Biodiversity pada Convention of Biological Biodiversity (CBD), Genewa, Swiss

PENGALAMAN KERJA :

- 1985 dan 1991-Sekarang Pengajar Kursus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Tipe A,B,C, PPLH-LP IPB
- 1992 -1998 Pengajar Kursus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Tipe A dan B, Unpad.
- 1995- Sekarang Pengajar Kursus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Tipe A, B dan C di Universitas Indonesia, Jakarta
- 1995- Sekarang Pengajar Kursus Audit Lingkungan I. Universitas Indonesia, Jakarta
- 1994-1995 Ketua Tim Penyusun Panduan Penyusunan Amdal Kegiatan di Wil. Pesisir dan Lautan. Bapedal, Jakarta
- 1995-1997 Course Leader dan Pengajar pada Kursus Pelatihan II Integrated Coastal Zone Planning and Management II Angkatan I s/d VIII. Proyek MREP (Marine Resources Evaluation and Planning). ADB, Diljen Bangda dan IPB.
- 1992-1994 Acting Environmental Manager Maxus, SES. Oil Company. Jakarta-USA.



ROKHMIN DAHURI DI TENGAH KELUARGA ■ e-ti/dok kel

Perikanan, yakni: "Ekosistem laut dan perairan tawar beserta segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dipelihara kelestariannya, dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia."

Guna mewujudkan visi tersebut, dirumuskan pula misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan, yakni: (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir lainnya; (2) Peningkatan peran sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi; (3) Peningkatan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan; (4) Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan, dan (5) Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari bangsa Indonesia.

Sementara untuk mewujudkan misi itu, ditetapkan delapan program yang satu sama lain saling terkait, yakni: (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya; (2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi

- BUKU:
1. Dahuri, R.J. J. Rais J. S.P. Ginting J. dan M.J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 305 halaman.
 2. Dahuri, R. 2000. Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat. Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia (LISPI), Jakarta. 146 halaman.
 3. Dahuri, R. 2002. Membangun Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Kelautan dan Perikanan. Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan (LISPI), Jakarta.
 4. Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Gramedia, Jakarta. "Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan" Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Tetap IPB 18 Januari 2003

ALAMAT KANTOR:
Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat
ALAMAT RUMAH:
Jalan Denpasar Raya C III/19, Kuningan, Jakarta Selatan

sektor kelautan dan perikanan sesuai kemampuan lestari sumber daya ikan (SDI) dan daya dukung lingkungan; (3) Peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan kawasan laut, pesisir, pulau-pulau kecil, dan perairan tawar; (4) Pengembangan teknologi dan sistem informasi sumberdaya kelautan dan perikanan; (5) Pengembangan sumberdaya manusia aparatur, dan penguatan kelembagaan; (6) Penyerasian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehubungan dengan otonomi daerah; (7) Pengembangan kerjasama

internasional; (8) Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa (perekat antarnusa) dan budaya bahari.

Dalam rangka menyukseskan program itu, Rokhmin melakukan kunjungan ke daerah setiap Jumat, Sabtu dan Minggu. Dalam setiap kunjungan itu, ia berupaya merangkul para pimpinan daerah yang memiliki kaitan dengan masalah ini serta menjalin kebersamaan antara para nelayan. Dengan kunjungan langsung seperti itu, ia pun dapat dengan tepat mengetahui setiap permasalahan sekaligus mengatasinya sebaik dan secepat mungkin. Boleh dibilang, Rokhmin adalah salah seorang menteri yang tidak mengenal lelah dan paling sering berkunjung ke daerah untuk melakukan yang terbaik dan meraih hasil terbaik.

Falsafah hidupnya telah membentuknya untuk selalu berbuat yang terbaik. Sejak masih di bangku SD hingga SMU, ia juga selalu berusaha menjadi yang terbaik dan selalu juara kelas. Begitu juga semasa kuliah di IPB dan ketika mendapat beasiswa program doktor ke Kanada. Bahkan saat menjadi dosen, ia pun menjadi dosen teladan I Tingkat Nasional. Ia adalah seorang tokoh muda yang pantas dijadikan idola dan teladan. Kisah hidupnya (pengalamannya) adalah guru yang baik bagi orang lain. □ e-ti



PRESIDEN MEGAWATI TEKAN TOMBOL PENCANANGAN GERBANG MINA BAHARI ■ e-mito.org

Gerbang Mina Bahari

Presiden Megawati Soekarnoputri telah mencanangkan Gerbang Mina Bahari, di Teluk Tomini, 11 Oktober 2003 lalu. Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan, ini diharapkan mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa untuk mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara cerdas, optimal dan lestari bagi kemajuan, kemakmuran dan kemandirian bangsa Indonesia. Sehingga dapat menjadi *trade mark* keberhasilan Kabinet Gotong Royong.

Pencanangan Gerbang Mina Bahari setidaknya telah diawali dengan sangat antusias dan optimis. Diikuti oleh sekitar 3000 peserta terdiri dari perwakilan nelayan, pembudidaya ikan, masyarakat pelaut, masyarakat pariwisata bahari, asosiasi kelautan dan perikanan, pengusaha kelautan dan perikanan, perbankan dan lembaga keuangan non-bank, para kepala dinas kelautan dan perikanan propinsi seluruh Indonesia, beberapa kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota, perwakilan gubernur seluruh Indonesia, beberapa bupati/walikota, anggota DPR-RI, TNI, para eselon-1 dan eselon-2 DKP, dan lainnya.

Dua hari sebelum pencanangan Gerbang Mina Bahari, ini dilaksanakan Rakornas dengan seluruh Gubernur dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan propinsi dalam rangka menentukan tugas dan kewajiban antara pemerintah pusat dan daerah di dalam mengimplementasikan Gerbang Mina Bahari. Rakornas semacam ini akan terus dilanjutkan secara reguler minimal dua kali dalam setahun guna

memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja Gerbang Mina Bahari.

Di samping itu, Pencanangan Gerbang Mina Bahari ditandai berbagai program terobosan (*breakthrough*) di bidang kelautan dan perikanan. Antara lain, penguatan dan pengembangan perikanan budidaya dengan bantuan benih unggul dan seperangkat alat PCR; pengembangan industri perikanan tangkap terpadu; pengoperasian VMS; pembentukan SISWASMAS nasional; pembangunan stasiun pengisian BBM untuk nelayan di 1260 lokasi; kredit MINA Mandiri; kredit Swamitra MINA Bukopin; BPR Pesisir dan Nelayan kerjasama dengan PT .PNM; pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil; dan parade armada nelayan Teluk Tomini.

Menteri Kelautan dan Perikanan Prof.Dr.Ir.Rokhmin Dahuri, MS, pada sambutannya mengatakan belajar dari sukses yang pernah diraih Korea Selatan dengan Semaui Undong-nya, dan Thailand dengan Gerakan Nasional Pembangunan Pertanian dengan motto menjadikan Thailand sebagai *Kitchen of the World*, diharapkan Gerbang Mina Bahari ini dapat menjadikan Indonesia

sebagai bangsa yang maju, makmur dan berkeadilan serta diridhoi Allah SWT, *baladun toyyibatun warrabun ghofur*.

Trademark

Ia juga berharap Gerbang Mina Bahari dapat menjadi *trade mark* keberhasilan Kabinet Gotong Royong. Sehubungan dengan itu, ia berharap Inpres dan Keppres tentang Gerbang Mina Bahari yang konsepnya tengah digodok oleh Sekretariat Negara segera dikeluarkan.

Rokhmin Dahuri mengatakan apabila Gerbang Mina Bahari ini dapat diimplementasikan, maka pada tahun 2006: "Produksi perikanan akan mencapai 9,5 juta ton. Total nilai ekspor perikanan menjadi sebesar US\$ 7. Devisa pariwisata bahari akan meningkat dari sekarang hanya US\$ 0,5 milyar menjadi US\$ 2,5 milyar. Jasa perhubungan laut yang selama ini menghamburkan devisa US\$ 10 milyar per tahun menjadi penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri. Serta tambahan lapangan kerja yang dapat tercipta diperkirakan sekitar 3 juta orang."

Ia berkeyakinan potensi kelautan dan perikanan Indonesia akan semakin dapat didayagunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Optimisme itu semakin mengemuka setelah melihat kenyataan dalam sekitar 3,5 tahun sejak berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan serta Dewan Maritim Indonesia, beberapa kemajuan di sektor kelautan dan perikanan secara faktual dapat dirasakan bersama. Menurutinya, itu diraih berkat kerja sama sinergis seluruh instansi terkait di pusat dan daerah serta segenap *stakeholders* kelautan dan perikanan

Misalnya, jika pada tahun 1998 total produksi perikanan Indonesia mencapai 4 juta ton yang menempatkan Indonesia sebagai produsen ikan terbesar ketujuh di dunia, maka pada tahun 2002 telah mencapai 5,6 juta ton, yang menjadikan Indonesia sebagai produsen ikan terbesar keenam di dunia (FAO 2002).

Dari total produksi tersebut, sebanyak 5 juta ton untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, sedangkan sisanya 0,6 juta ton untuk ekspor dengan perolehan devisa sekitar US\$ 2,1 milyar, meningkat US\$ 500 juta dibandingkan nilai devisa perikanan tahun 1998 yang hanya US\$ 1,6 juta. Jika sebelum adanya DKP, sektor kelautan dan perikanan tidak menghasilkan PNPB, maka pada tahun 2002 sektor ini telah menyumbangkan PNPB hampir Rp 300 milyar. Tahun 2003 diharapkan menghasilkan Rp 450 milyar, dan tahun 2004 PNPB sektor kelautan dan perikanan insya Allah mencapai Rp 700 milyar.

Sumbangan subsektor perikanan dari produk primer terhadap PDB pada tahun 2001 sebesar 2% (Rp 25 trilyun), maka pada tahun 2002 meningkat menjadi 3% (Rp 47 trilyun). Dan, apabila dihitung dengan produk sekunder (olahannya), maka kontribusinya terhadap PDB pada tahun 2002 hampir 10% (BPS, 2002). Pendapatan sebagian nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang ikan yang telah mendapatkan sentuhan program PEMP, INBUDKAN, dan Optimalisasi Perikanan Tangkap juga meningkat cukup signifikan.

"Sedikit kemajuan di atas, diperoleh dengan menerapkan berbagai kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang pada intinya bagaimana menekan biaya produksi usaha perikanan dan kelautan serendah mungkin dan meningkatkan pendapatan semaksimal mungkin sesuai batas-batas kelestarian sumberdaya ikan beserta ekosistemnya," ujarnya.

Rokhmin juga mengungkapkan bahwa sepanjang sejarah republik baru sejak awal tahun ini sekitar 1260

tempat-tempat pendaratan ikan dan pemukiman nelayan telah dan akan mendapatkan stasiun pengisian bahan bakar. Sehingga, yang selama ini para nelayan membeli solar atau bensin jauh lebih mahal ketimbang harga patokan Pertamina, maka mulai awal 2003 para nelayan dapat membeli BBM dengan harga sama dengan harga patokan tersebut.

Sejak Maret 2003, Bank Mandiri telah menyediakan kredit khusus untuk usaha perikanan sebesar Rp 3 trilyun untuk jangka waktu sampai Maret 2004. Bank Bukopin telah dan akan membangun kredit simpan-pinjam khusus untuk usaha perikanan, bernama Swamitra Mina di 160 kabupaten/kota pesisir.

PT. PNM telah menandatangani kerjasama dengan 30 Bupati/Walikota di KBI dan KTI untuk mendirikan BPR Pesisir dan Nelayan.

Ia menyebut pembangunan dan perbaikan pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan terus dilakukan. "Modernisasi dan optimalisasi usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan pemasarannya baik di dalam negeri maupun pasar ekspor terus dikembangkan dan diperkuat," katanya.

Mengenai kapal ikan asing ilegal, Rokhmin mengatakan bahwa berkat dukungan penuh berbagai instansi terkait, utamanya TNI-AL dan POLAIRUD, maka kurang lebih 5000 kapal ikan asing ilegal yang sebelumnya beroperasi di perairan Indonesia, kini hanya sekitar 1000 yang masih belum berhasil ditertibkan. Oleh sebab itu, kerugian negara akibat *illegal fishing* yang dulu senilai US\$ 4 milyar, kini tinggal US\$ 1 milyar.

Segelintir keberhasilan tersebut, kata Rokhmin, memang semestinya kita syukuri. Namun demikian, tegasnya, seluruh insan kelautan dan perikanan di tanah air masih jauh dari puas. "Karena kami berkeyakinan bahwa sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, dengan luas laut 5,8 juta km2 atau

3/4 dari total wilayah Indonesia, dan ditaburi sekitar 17.506 pulau yang dikelilingi oleh 81.000 km garis pantai; sesungguhnya Indonesia memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam."

Ia menyebut berbagai potensi itu, mulai dari sumberdaya yang dapat diperbaharui seperti perikanan, terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove; serta sumberdaya yang tak terbaharui termasuk migas dan bahan tambang serta mineral lainnya; sampai dengan energi dan jasa-jasa lingkungan, khususnya pariwisata bahari. Menurut perhitungan PKSPL-IPB (1998), bahwa nilai ekonomi dari sumberdaya perikanan (tangkap, budidaya, dan industri bioteknologi perairan) saja dapat menghasilkan sekitar US\$ 82 milyar/tahun.

Sementara itu, seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dunia dan kesadaran umat manusia akan kebaikan gizi ikani (*seafood*) bagi kesehatan, kecerdasan dan kekuatan manusia, maka dapat dipastikan permintaan terhadap produk dan jasa kelautan dan perikanan akan terus membesar.

"Apalagi kalau kita membandingkan (*bench marking*) dengan kinerja sektor kelautan dan perikanan negara-negara lain dengan potensi yang jauh lebih kecil dari pada Indonesia, seperti Thailand, Filipina, RRC, Taiwan, Norwegia, dan Islandia. Kami semakin yakin bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan sumbangan yang jauh lebih signifikan bagi kemajuan, kemakmuran dan kemandirian bangsa Indonesia," ujar Rokhmin. □ e-ti/juka



ROKHMIN DAHURI DI PASAR IKAN ■ e-ti/info dkp

Reorientasi Pembangunan

WAWANCARA ROKHMIN DAHURI

Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga guru besar tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), ini menggagas paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia melakukan reorientasi paradigma pembangunannya.



ROKHMIN DAHURI ■ e-ti/info dkp

Reorientasi tersebut mencakup dua hal mendasar. *Pertama*, reorientasi fokus pembangunan, dari basis sumberdaya daratan ke basis sumberdaya kelautan. *Kedua*, bahwa tujuan pembangunan kelautan hendaknya tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan

kan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran), pemerataan kesejahteraan (*social equity*), dan terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir serta lautan secara seimbang (proporsional).

Laut jangan lagi dipersepsikan sebagai keranjang sampah (tempat pembuangan

limbah dari darat) dan ajang ekstraksi sumber daya alam secara berlebihan, tetapi sebagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia.

Menteri yang memang ahli dan menyatu dengan bidang kelautan dan perikanan ini

nan Berbasis Kelautan

berbicara mengenai hal-hal mendasar dan strategis mengenai berbagai masalah pembangunan kelautan dalam dua kali percakapan dengan Wartawan Tokoh Indonesia DotCom. Berikut petikannya.

M-TI: Anda menggagas paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan. Apa yang melandasi gagasan ini?

ROKHMİN: Gagasan paradigma pembangunan ini selain berdasarkan pada potensi, peluang, permasalahan, kendala, dan kondisi pembangunan kelautan yang ada, juga mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis terhadap pembangunan nasional seperti globalisasi dan otonomi daerah.

Letak geografis dan kandungan sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia memberikan pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, dengan luas laut 5,8 juta km² atau 3/4 dari total wilayah Indonesia merupakan lautan dan ditaburi sekitar 17.506 pulau yang dikelilingi oleh 81.000 km garis pantai dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Kondisi geografis ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Indonesia berada pada posisi geopolitis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, sebuah kawasan paling dinamis dalam percaturan politik, pertahanan dan keamanan dunia. Alasan di atas sudah cukup menjadi dasar untuk menjadikan pembangunan kelautan sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan nasional.

Selain itu, banyak argumen yang memperkuat mengapa pembangunan berbasis sumber daya kelautan, harus dijadikan arus utama pembangunan nasional, baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. *Pertama*, melimpahnya sumber daya kelautan perikanan yang kita miliki, dengan sejumlah keunggulan komparatif sekaligus kompetitif yang sangat tinggi.

Kedua, keterkaitan yang kuat (*backward and forward linkage*) antara industri berbasis kelautan dengan industri dan aktivitas ekonomi lainnya. Dengan mengembangkan industri berbasis sumber daya kelautan berarti juga mendorong aktivitas ekonomi di sektor lainnya, termasuk usaha transportasi, komunikasi, perdagangan, pengolahan, dan jasa-jasa lainnya.

Ketiga, sumber daya kelautan merupakan sumber daya yang senantiasa dapat diperbaharui (*renewable resources*) sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif ini dapat bertahan panjang asal diikuti dengan pengelolaan yang arif.

Keempat, dari aspek politik, dengan kondisi geopolitis yang ada, maka stabilitas politik dalam negeri dan luar negeri dapat dicapai, jika kita memiliki jaminan keamanan dan pertahanan dalam menjaga kedaulatan perairan.

Kelima, dari sisi sosial dan budaya, menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan sebagai arus utama pembangunan bangsa merupakan penemuan kembali (*reinventing*) aspek kehidupan yang pernah dominan dalam budaya dan tradisi kita sebagai bangsa. Sejarah mencatat bahwa pusat-pusat ekonomi dan peradaban yang pernah ada di wilayah Nusantara, selama berabad-abad telah menjadikan sumber daya kelautan sebagai basis pertumbuhannya dalam mencapai kemakmuran dan kemajuan dalam peradabannya. Pada saat itu, laut telah menjadi media hubungan nasional dan internasional, serta menjadi suatu kawasan penting, baik secara politik, ekonomi dan militer. Bahkan, sampai sekarang masih terlihat sisa-sisa budaya berbasis bahari ini pada beberapa suku di Indonesia.

M-TI: Potensi sumber daya kelautan Indonesia demikian besar. Bagaimana posisi pembangunan berbasis sumber daya kelautan selama ini?

ROKHMİN: Suatu



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SAAT WAWANCARA ■ e-ti/yusak

kenyataan pahit yang harus kita akui bahwa selama ini, ternyata pembangunan berbasis sumber daya kelautan diabaikan. Pembangunan berbasis sumber daya kelautan dianggap sebagai sektor pinggiran. Rendahnya kinerja sektor ekonomi berbasis kelautan yang jauh dari potensi yang dimiliki, merupakan harga yang harus dibayar, akibat kelalaian serta *ignorant* kita sendiri sebagai bangsa.

Namun, sejak reformasi, muncul kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya

kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional telah mendapatkan tempat yang lebih baik serta pijakan yang lebih kuat. Ini tercermin dari keputusan politik bangsa sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, yang ditindak-lanjuti dengan membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai institusi utama (*leading institution*) yang bertanggung jawab memberi arahan, mengeluarkan kebijakan, dan melaksanakan program-program di bidang kelautan dan perikanan.

an. Kondisi ini membuat kita semakin maju beberapa langkah dalam menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan sebagai arus utama pembangunan bangsa.

M-TI: Munculnya kesadaran dan keputusan politik itu tentu telah membuka kondisi yang kondusif untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan sebagai arus utama pembangunan bangsa. Lalu bagaimana pembangunan berbasis sumber daya kelautan tersebut dilaksanakan dalam konteks Indonesia baru di tengah arus globalisasi yang semakin deras melanda dunia?

ROKHMİN: Pembangunan ekonomi dunia di masa datang yang penuh tantangan dan persaingan yang ketat, membutuhkan faktor-faktor produksi seperti sumberdaya alam yang penggunaannya akan semakin meningkat. Bahkan tidak mustahil akan mengakibatkan kelangkaan serta persaingan dalam mendapatkannya.

Dengan demikian orientasi pembangunan bangsa Indonesia ke depan yang berbasis pada sumberdaya kelautan merupakan suatu keniscayaan.

Sementara, ada beberapa model pembangunan yang dikembangkan. Namun untuk Indonesia baru di tengah arus globalisasi yang sama-kini deras melanda dunia, model yang kita pilih adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Suatu model pembangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa menurunkan atau menghancurkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan ini mengandung tiga unsur utama yakni dimensi ekonomi, ekologi dan sosial.

Pertama, pembangunan secara ekonomis dianggap berkelanjutan (*an economically sustainable area/ecosystem*) jika kawasan tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa (*good and services*) secara berkesinambungan (*on continuing basis*), memelihara pemerintahan



BERSAMA ISTERI DAN ANAK ■ e-ti/info dkp

ROKHMİN DAHURI:
Selalu ingin berbuat
yang terbaik dan
menjadi yang terbaik.

dari hutang luar negeri pada tingkatan yang terkendali (*a manageable level*), dan menghindari ketidakseimbangan yang ekstrim antarsektor (*extreme sectoral imbalances*) yang dapat mengakibatkan kehancuran produksi sektor primer, sekunder, atau tersier.

Kedua, pembangunan dikatakan secara ekologis berkelanjutan (*an ecologically sustainable arealecosystem*), manakala basis (ketersediaan stok) sumber daya alamnya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi berlebih terhadap sumber daya dapat diperbaharui (*renewable resources*), tidak terjadi pembuangan limbah melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar, serta pemanfaatan sumber daya tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*) yang dibarengi dengan upaya pengembangan bahan substitusinya secara memadai. Dalam konteks ini termasuk pula pemeliharaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), stabilitas sik-

lus hidrologi, siklus biogeokimia, dan kondisi iklim.

Ketiga, pembangunan

dianggap secara sosial berkelanjutan (*a socially sustainable area/ecosystem*), apabila kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan) seluruh penduduknya terpenuhi; terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil; ada kesetaraan gender (*gender equity*); terdapat akuntabilitas dan partisipasi politik.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan pembangunan berbasis sumber daya kelautan, maka secara teknis dapat didefinisikan bahwa "pembangunan kelautan berkelanjutan (*sustainable marine development*) adalah suatu upaya pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam kawasan pesisir dan lautan untuk kesejahteraan manusia, terutama *stakeholders*, sedemikian rupa, sehingga laju (tingkat) pemanfaatan tidak melebihi daya dukung (*carrying capacity*) kawasan pesisir dan lautan untuk menyediakannya".

M-TI: Anda begitu optimis dengan pembangunan berbasis kelautan ini. Sesungguhnya seberapa banyak potensi sumberdaya laut Indonesia ditinjau dari sisi kuantitas maupun diversitasnya?

ROKHMİN: Karakteristik geografis Indonesia serta struktur dan tipologi ekosistemnya yang didominasi oleh lautan telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai *mega-biodiversity* terbesar di dunia, yang merupakan justifikasi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara bahari terbesar di dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa sumberdaya kelautan merupakan kekayaan alam yang memiliki peluang amat potensial dimanfaatkan sebagai sumberdaya yang efektif dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Berdasarkan jenisnya sumberdaya kelautan dibagi menjadi: (1) Sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*) antara lain ikan dan biota perairan lainnya, hutan mangrove, padang lamun, rumput laut, ekosistem pantai dan pulau-pulau kecil; (2) Sumberdaya yang tak dapat pulih (*unrenewable resources*), antara lain minyak dan gas bumi, bahan tambang dan mineral lainnya; (3) Energi kelautan, antara lain gelombang, pasang surut, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), dan angin; (4) Jasa lingkungan, antara lain media transportasi dan komunikasi, pengaturan iklim, keindahan alam, dan penyerapan limbah.

Dengan luas laut 5,8 juta km², Indonesia sesungguhnya memiliki sumberdaya perikanan laut yang cukup besar baik dari segi kuantitas maupun keragamannya. Berdasarkan perhitungan harga di tingkat produsen tahun 2000 nilai produksi ikan tangkap mencapai Rp. 18,46 triliun. Sedangkan untuk benih ikan laut mencapai Rp 8,07 milyar. Sedangkan untuk budidaya laut yang meliputi ikan, rumput laut, kerang-kerangan, tiram, teripang, mutiara mencapai produksi senilai Rp 1,36 triliun di tingkat produsen pada tahun 2002.

Sumberdaya laut Indonesia dengan kekayaan keanekaragaman hayati memiliki potensi untuk

pengembangan bioteknologi kelautan. Sumber daya tersebut memiliki kegunaan untuk makanan, minuman, farmasi, dan kosmetika. Dengan pengembangan industri bioteknologi tersebut dapat diharapkan kekayaan hayati yang beraneka ragam itu menjadi produk yang bernilai tinggi. Diperkirakan terdapat 35.000 spesies biota laut memiliki potensi sebagai penghasil obat-obatan, sementara yang dimanfaatkan baru 5.000 spesies.

Potensi wisata bahari Indonesia pun memiliki nilai yang cukup tinggi. Di Indonesia terdapat 241 Daerah Tingkat II yang memiliki pesisir.

Dengan demikian Indonesia memiliki lokasi obyek wisata bahari yang cukup besar dibandingkan dengan negara lain. Produk yang bisa dikembangkan antara lain wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga.

Dari sektor pertambangan, laut Indonesia menyimpan potensi kekayaan yang cukup besar berupa minyak dan gas bumi. Diperkirakan Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang dapat menghasilkan 84,48 milyar barel minyak. Dari sejumlah itu, baru 9,8 milyar barel yang diketahui pasti. Sedangkan sisanya sebesar 74,68 milyar barel berupa kekayaan yang belum dimanfaatkan.

M-TI: Seberapa besar potensi dan kontribusi kelautan terhadap PDB?

ROKHMIN: Keberhasilan pembangunan di bidang kelautan sejatinya tidak hanya ditunjukkan dengan mengklaim diri sebagai negara maritim atau diwujudkan melalui kebanggaan terhadap keunggulan komparatif yang dimiliki saja, tetapi sejauh mana kemampuan kita dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan tersebut dalam mencapai kemakmuran bangsa.

Salah satu ukuran adalah besarnya kontribusi kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Dari tahun ke tahun bidang kelautan memberikan kontribusi yang terus meningkat terhadap PDB. Pada tahun 1995 total

PDB yang disumbangkan sektor kelautan mencapai Rp 55,9 triliun atau 12,32 % dari total PDB nasional. Hasil tersebut terus mengalami peningkatan dan pada tahun 1998 menyumbang 20,06 persen dari total PDB atau senilai Rp 189,13 triliun.

Namun demikian, ekspansi ekonomi yang diarahkan pada penciptaan pertumbuhan produksi maksimal yang dicirikan dengan kegiatan eksploitatif telah mewarnai praktek pembangunan bidang kelautan dalam tiga dasawarsa terakhir. Keadaan ini telah mengakibatkan adanya semacam ongkos yang harus ditanggung dalam dimensi jangka panjang.

Dari tujuh sektor kegiatan kelautan yaitu perikanan, pertambangan, industri maritim, angkutan laut, pariwisata bahari, bangunan kelautan, dan jasa kelautan

perikanan Indonesia mencapai 4 juta ton yang menempatkan Indonesia sebagai produsen ikan terbesar ketujuh di dunia, maka pada tahun 2002 telah mencapai 5,6 juta ton, yang menjadikan Indonesia sebagai produsen ikan terbesar keenam di dunia (FAO 2002).

Dari total produksi tersebut, sebanyak 5 juta ton untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, sedangkan sisanya 0,6 juta ton untuk ekspor dengan perolehan devisa sekitar US\$ 2,1 milyar, meningkat US\$ 500 juta dibandingkan nilai devisa perikanan tahun 1998 yang hanya US\$ 1,6 juta. Jika sebelum adanya DKP, sektor kelautan dan perikanan tidak menghasilkan PNPB, maka pada tahun 2002 sektor ini telah menyumbangkan PNPB hampir Rp 300 inilyar. Tahun 2003



KUNJUNGAN KERJA SETIAP MINGGU ■ e-ti/info dkp

lainnya, ternyata sektor pertambangan mendominasi kontribusi bagi PDB dengan 35,2 persen pada tahun 1995 dan meningkat menjadi 49,78 persen pada tahun 1998. Sementara sektor perikanan menyumbang 11,56 persen pada tahun 1998 dan menurun menjadi 10,76 % pada tahun 1998.

Namun, sekitar 3,5 tahun sejak berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan serta Dewan Maritim Indonesia, beberapa kemajuan di sektor kelautan dan perikanan secara faktual dapat dirasakan bersama. Misalnya, jika pada tahun 1998 total produksi

diharapkan menghasilkan Rp 450 milyar, dan tahun 2004 PNPB sektor kelautan dan perikanan insya Allah mencapai Rp 700 milyar.

Sumbangan subsektor perikanan dari produk primer terhadap PDB pada tahun 2001 sebesar 2% (Rp 25 trilyun), maka pada tahun 2002 meningkat menjadi 3% (Rp 47 trilyun). Dan, apabila dihitung dengan produk sekunder (olahannya), maka kontribusinya terhadap PDB pada tahun 2002 hampir 10% (BPS, 2002).

M-TI: Bagaimana perbandingan ekspor-impor perikanan Indonesia?

ROKHMIN: Meskipun Indonesia masih perlu mengimpor beberapa komoditi perikanan, namun secara keseluruhan masih terjadi surplus, dimana ekspor lebih besar dari impor. Dengan demikian sektor perikanan adalah sektor yang tidak membebani neraca keuangan negara. Sebaliknya, malah menjadi andalan untuk menyumbang devisa.

Ekspor hasil perikanan Indonesia jumlahnya terus meningkat. Beberapa komoditi perikanan Indonesia yang diekspor adalah udang, tuna-cakalang, rumput laut, kerang-kerangan, kepiting, ikan hias, ubur-ubur, dan mutiara.

Sampai saat ini volume dan nilai ekspor Indonesia masih didominasi udang dan tuna-cakalang. Perdagangan ekspor udang terus meningkat dalam kurun waktu 1998-2001 dengan nilai 1,07 milyar dolar AS. Ekspor tuna/cakalang pun meningkat walaupun nilainya tidak sebesar udang yaitu senilai 230 juta dolar AS.

Di sisi lain, meski mampu meningkatkan ekspor, namun pertumbuhan itu masih diikuti kenaikan impor. Volume impor pada periode 1998-2000 rata-rata naik sebesar 25,98 persen dengan kenaikan nilai rata-rata mencapai 1,73 persen.

Faktor lain yang menunjang meningkatnya volume impor adalah maraknya rumah makan asing dan hotel yang memilih ikan impor (jenis ikan yang tidak hidup di perairan Indonesia) dalam memenuhi selera makan konsumen.

M-TI: Produksi perikanan Indonesia kini semakin meningkat. Apakah dengan meningkatnya produksi tersebut meningkat pula konsumsi ikan per kapita Indonesia?

ROKHMIN: Jelas! Peningkatan produksi perikanan yang telah dicapai selama ini telah meningkatkan konsumsi ikan per kapita dari 19,98 kg per kapita pada tahun 1998 menjadi 21,78 kg per kapita pada tahun 2001. Konsumsi ikan pada masa mendatang diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat akan arti penting

nilai gizi produk perikanan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia.

Namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang termasuk ke dalam negara penghasil ikan dunia, Indonesia masih paling rendah mengonsumsi ikan perkapita. Bahkan lebih rendah dibanding dengan Filipina. Sebagai contoh, pada tahun 1990 konsumsi ikan Filipina sudah mencapai 24 kg per kapita per tahun dan Jepang mencapai 110 kg per kapita per tahun.

Peningkatan konsumsi ikan per kapita memiliki korelasi dengan pendapatan per kapita suatu negara. Hal ini disebabkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap suatu produk tergantung pada tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan semakin besar peluang untuk mengonsumsi produk pangan berprotein tinggi seperti ikan dan produk hasil laut lainnya.

M-TI: Bagaimana dengan penyerapan tenaga kerja perikanan?

ROKHMİN: Berdasarkan pola produksinya, tenaga kerja yang terjun ke kegiatan produksi perikanan dibedakan menjadi dua macam, yakni nelayan dan pembudidaya ikan.

Nelayan dikategorikan sebagai tenaga kerja yang melakukan aktivitas produksinya dengan cara berburu ikan di laut atau melaut. Umumnya mereka memiliki alat produksi utama seperti kapal, pancing, jaring, bagan, dan lain-lain.

Perkembangan teknik penangkapan modern, terutama semenjak diperkenalkannya motorisasi (modernisasi perikanan) telah membuat formasi sosial nelayan menjadi dua kategori, yakni nelayan tradisional dan nelayan modern.

Berdasarkan teknik dan alat-alat penangkapannya, nelayan tradisional adalah nelayan yang masih mempertahankan cara penangkapannya dengan menggunakan kapal tanpa motor (KTM), tanpa inovasi teknologi, tanpa dukungan modal yang kuat, tanpa kelembagaan usaha yang mapan, cenderung bersifat subsistem, dan secara geneologi telah menekuni aktivitas tersebut

secara turun temurun.

Berbeda halnya dengan nelayan modern, teknik penangkapannya mengadopsi perkembangan teknologi, seperti kapal motor hingga ke teknologi citra satelit misalnya. Dukungan modal

utama pun mengalami kenaikan 5,06 persen dibanding tahun sebelumnya atau berjumlah 911.163 orang pada tahun 2000.

Sementara, pembudidaya ikan adalah tenaga kerja perikanan yang menyandar-

an sumberdaya manusia di sektor perikanan khususnya dalam hal rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan nelayan. Berdasarkan perkembangan kualitas pendidikan SDM perikanan bagian terbesar nelayan berpendi-

Konsumsi ikan per kapita Indonesia kini semakin meningkat. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa negara lain penghasil ikan dunia, Indonesia masih paling rendah mengonsumsi ikan perkapita.

dan kelembagaan usahanya mapan, serta ciri-ciri subsistem telah hilang. Usaha penangkapannya ditujukan semata-mata untuk meraih profit secara maksimal.

Modernisasi perikanan ternyata tidak hanya memilah formasi nelayan atas dasar kepemilikan cara produksi, namun telah memilah pula nelayan atas dasar kepemilikan alat produksi. Nelayan yang memiliki alat-alat produksi seperti kapal dan modal digolongkan sebagai nelayan pemilik. Berbeda halnya dengan nelayan yang tidak memiliki alat produksi dan menjual tenaga atau keahliannya untuk menangkap ikan, dikategorikan sebagai nelayan buruh. Klasifikasi nelayan tersebut, atas dasar teknik dan kepemilikan alat produksi itu masih dibedakan berdasarkan kegiatan menjadi nelayan penuh, nelayan sebagai sambilan utama, dan nelayan sebagai sambilan tambahan.

Sampai dengan tahun 2000 jumlah total nelayan Indonesia sekitar 2.486.456 orang atau mengalami kenaikan 3,21 persen dibandingkan tahun 1999 dan dalam kurun waktu 1990-2000 telah mengalami peningkatan sebesar 5 persen per tahun. Nelayan berprofesi penuh pada tahun 2000 berjumlah 1.212.195 orang atau mengalami kenaikan sebesar 3,06 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah tenaga kerja yang menjadi nelayan sambilan

kan teknik produksinya pada kegiatan budidaya, dan jenis komoditi produksinya adalah jenis-jenis ikan budidaya ekonomis penting, seperti udang, bandeng, ikan mas, gurami, ikan hias atau komoditi lainnya, seperti rumput laut dan lain-lain. Kecenderungan pola sosial atas dasar perbedaan pola dan teknik produksi dan perbedaan kepemilikan alat produksi terjadi pula di kegiatan budidaya perikanan. Aktivitas produksi budidaya dapat digolongkan ke dalam kegiatan budidaya tambak, kolam, karamba, dan sawah.

Perkembangan jumlah pembudidaya ikan tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen sejak tahun 1998 walau pernah mengalami penurunan sebesar 0,12 persen saat terjadinya krisis moneter 1997. Jumlah pembudidaya ikan kolam masih mendominasi jumlah pembudidaya ikan.

Sementara itu, distribusi tenaga kerja perikanan, khususnya nelayan, pada tahun 2000 terlihat tidak merata. Di kawasan barat Indonesia, jumlah nelayan terbesar terdapat di Jawa Timur (386.482 jiwa), Jawa Tengah (192.349 jiwa), Sumatera Utara (177.804 jiwa) dan Riau (123.146 jiwa). Sedangkan di kawasan timur Indonesia daerah yang memiliki jumlah nelayan besar adalah Sulawesi Selatan (146.941 jiwa), Papua (190.178 jiwa), dan Maluku (120.361 jiwa).

Selain itu, hal yang patut dicermati adalah permasalahan

kan rendah yaitu 70 persen tidak tamat sekolah dasar (SD) dan tidak sekolah, 19,59 persen tamat sekolah dasar, dan hanya 0,03 persen yang memiliki pendidikan sampai jenjang Diploma 3 dan Sarjana.

M-TI: Jumlah tenaga kerja di sektor perikanan meningkat, apakah juga ada peningkatan pendapatan mereka secara signifikan?

ROKHMİN: Selama ini nelayan dan pembudidaya ikan belum sepenuhnya menikmati nilai tambah dari pemanfaatan potensi dan produksi perikanan. Ketergantungan pada iklim dan lingkungan menyebabkan pendapatan nelayan di setiap daerah menjadi berbeda-beda.

Hasil penelitian Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB tahun 1996 mengungkapkan bahwa pendapatan Rumah Tangga Nelayan di desa pesisir Lombok Bagian Barat berkisar antara Rp 210.540-Rp 643.510 per tahun. Pendapatan nelayan ini diperkirakan menjadi lebih kecil dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan, karena meningkatnya biaya operasional dari sebelumnya, sementara depresiasi nilai rupiah terhadap dollar Amerika tidak dinikmati oleh nelayan kecil, karena pangsa pasar nelayan tradisional ini masih terfokus dalam negeri. Hal yang berbeda justru dialami pengusaha perikanan yang berorientasi ekspor, dimana

nilai produksi perikanan mengalami peningkatan karena adanya depresiasi rupiah terhadap dollar.

Untuk melihat tingkat pendapatan nelayan juga bisa dilakukan dengan melihat proporsi produksi ikan dengan jumlah nelayan per hari. Saat ini kita memiliki potensi lestari 6,26 juta ton, namun produksi nelayan per hari kita jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain yang potensi perikanan-nya tidak melebihi potensi perikanan Indonesia. Jika dibandingkan dengan empat negara lainnya, Rusia (140 kg/nelayan/hari), Jepang (75 kg/nelayan/hari), USA (100 kg/nelayan/hari), dan Norwegia (98 kg/nelayan/hari), maka Indonesia memiliki proporsi produksi terhadap nelayan yang paling kecil, yaitu 5,5 kg/ nelayan/hari.

M-TI: Bagaimana dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aspek kelautan?

ROKHMİN: Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kegiatan pengelolaan di bidang kelautan, secara kuantitatif relatif sudah memadai. Selama tiga puluh tahun terakhir, tidak kurang dari tiga puluh produk hukum telah diproduksi untuk mengatur sektor perikanan. Namun, secara substantif, produk hukum tersebut sangat memprihatinkan. Secara kategorik, produk hukum perikanan tersebut memiliki tiga ciri pokok, yakni sentralistik, berbasis pada doktrin *open-access*, dan anti pluralisme hukum.

Ciri sentralistik dari produk hukum di sektor perikanan menjelma, baik dari sisi materi maupun dari sisi proses produksinya. Dari sisi materi muatannya, produk hukum tersebut mengkonsentrasikan kewenangan pengelolaan sumberdaya perikanan hanya pada pemerintah pusat. Hal ini kemudian mendorong tumbuhnya sikap merasa 'tidak memiliki laut' di kalangan pemerintah dan masyarakat daerah. Akibatnya, di mata pemerintah dan masyarakat daerah, laut dipandang sebagai 'halaman belakang' dan 'bak sampah'. Suatu hal yang



ROKHMİN BERSAMA BARNEY SMITH. KERJAMASA INDONESIA-AUSTRALIA ■ e-ti/aciari



ROKHMİN MENGUNJUNGI NELAYAN ■ e-ti/info dkp

tidak kondusif bagi upaya konservasi sumberdaya kelautan. Dari sisi proses produksinya, hukum kelautan pada umumnya, diformulasi dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri (Kepmen). Produk hukum yang demikian, jelas kurang memiliki akuntabilitas politik.

Selanjutnya, hukum kelautan kita juga dirancang atas dasar doktrin bahwa sumberdaya kelautan merupakan sumberdaya *open-access* sehingga pembatasan keikutsertaan dalam okupasinya menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Laut, ibarat sebuah arena pertarungan bebas, yang tentu saja akan selalu melahirkan pemenang dan pecundang.

Pengalaman menunjukkan bahwa para pengusaha perikanan berkapital besar yang selalu keluar sebagai pemenang. Perlawanan nelayan tradisional yang cenderung sangat radikal, seperti di Bagan Percut Sumatera Utara, merupakan isyarat bahwa tekanan terhadap nelayan tradisional sudah sampai pada titik yang tidak mampu ditolerir.

Konsekuensi logis dari kedua ciri di atas, yakni hukum kelautan yang anti kemajemukan. Hukum adat dan tradisi masyarakat lokal tidak diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, padahal hukum adat tersebut telah terbukti sangat efektif menjaga kelestarian sumberdaya alam. *Sasi* di Maluku, *panglima laut* di Aceh, atau

tradisi *rompong* di Sulawesi Selatan merupakan contoh aktual dari hukum adat atau tradisi lokal yang demikian itu.

Sesungguhnya, terdapat pula beberapa produk hukum yang memihak kepentingan nelayan tradisional, seperti larangan penggunaan pukat harimau. Namun, ketika sampai pada tingkat implementasi, ketentuan tersebut seperti tak bergigi. Lemahnya penegakan hukum masih merupakan salah satu kendala.

Kelahiran UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, memberikan secercah harapan. Melalui UU ini, sentralisme kewenangan pengelolaan sumberdaya kelautan dapat dikurangi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang signifikan untuk mengelola laut. Karena itu, yang diperlembagakan saat ini bukan 'menghapus' ketentuan Pasal 3 dan 10 UU Nomor 22 Tahun 1999, yang membuka peluang desentralisasi, tetapi penjabaran dan penyusunan standar dan prosedur pengelolaan yang baik dan bertanggungjawab sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan yang diterima secara universal.

M-TI: Tak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Pulau itu terpisah oleh laut. Masalahnya, pembangunan pulau-pulau kecil tampaknya tidak begitu

terdengar. Bagaimana penangan keberadaan pulau-pulau kecil itu?

ROKHMİN: Sebagai negara kepulauan, Indonesia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, telah menjadikan bangsa ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun *frame work* pembangunan bangsa yang dipraktekkan selama ini mengakibatkan kita hanya mengenal pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua dan Bali, yang menjadi pusat-pusat aktivitas utama dalam pembangunan. Akibatnya banyak dari kita yang kurang mengenal pulau-pulau kecil atau gugusan pulau-pulau kecil lainnya sehingga kawasan ini menjadi telantar atau tidak terkelola dengan baik.

Konsekuensi logis dari keadaan ini menimbulkan kesenjangan pertumbuhan dan kurangnya sinkronisasi pengembangan antarwilayah. Pada gilirannya, hal ini akan membawa kepada munculnya kerawanan baru terutama pada pulau-pulau di kawasan perbatasan. Contoh paling nyata yang baru saja kita rasakan adalah keputusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002 di Den Haag, Belanda yang memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan berada dalam kedaulatan Malaysia.

Alasan utama keputusan itu dilandasi oleh adanya tindakan administratif secara

nyata oleh pemerintah Inggris pada kedua pulau tersebut sejak tahun 1917. Dengan perkataan lain, dari pengalaman ini dapat kita simpulkan bahwa tanpa adanya perhatian terhadap pemberdayaan pulau-pulau kecil, terutama yang berbatasan dengan negara asing, maka kedaulatan bangsa Indonesia sesungguhnya dalam ancaman besar.

Oleh sebab itu, sentuhan pembangunan pada pulau-pulau serupa perlu dilakukan meskipun memiliki tingkat keisolasian yang tinggi. Sentuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara menarik investasi ke pulau-pulau tersebut, mendeklarasikan pulau yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi sebagai kawasan konservasi, melakukan penataan ruang, mendorong nelayan melakukan aktivitas penangkapan di perairan sekitar pulau, merangsang aktivitas ekonomi masyarakat penghuni pulau melalui paket-paket tertentu.

Di lain pihak, pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil tersebut masih dihadapkan pada berbagai masalah an-tara lain letaknya yang ter-pencil, terbatasnya sarana, prasarana dan sumberdaya manusia. Di samping itu, di dalam pemanfaatannya perlu memperhatikan daya dukung pulau mengingat sifatnya yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di kawasan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat, sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan potensi sumberdaya pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

M-TI: Adakah kekayaan lain di sektor kelautan yang luput dari perhatian masyarakat?

ROKHMİN: Satu hal yang barangkali sering kita lupakan, bahwa laut Indonesia memiliki ratusan titik harta karun. Benda-benda berharga itu berasal dari muatan kapal yang tenggelam. Sebagai salah satu sumberdaya buatan, benda-benda berharga itu

mulai menjadi titik perhatian semenjak dikeluarkannya Keppres Nomor 107 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Nasional Pemanfaatan Benda-benda Berharga asal Muatan Kapal Tenggelam sebagai pengganti Keppres Nomor 43 tahun 1989.

Benda berharga di dasar laut ini menarik minat banyak orang karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dari unsur sejarah yang dimilikinya.

Dari hasil pemetaan diperkirakan terdapat 463 titik yang potensial terdapat benda berharga dasar laut, yang sebagian besar terdapat di lokasi-lokasi pelayaran yang menjadi lintasan perdagangan kerajaan-kerajaan masa lalu. Pemanfaatan dan pengangkatan benda-benda berharga tersebut telah berlangsung cukup lama. Pada tahun 1986 misalnya, telah dilakukan pengangkatan harta karun yang berasal dari kapal *De Geldermalsen* yang tenggelam di perairan Kepulauan Riau 235 tahun yang lalu. Dari operasi

bisa dimanfaatkan menjadi hilang.

M-TI: Sedemikian besar kekayaan laut kita, lantas bagaimana sebaiknya profil pembangunan kelautan ke depan?

ROKHMİN: Profil pembangunan kelautan Indonesia ke depan adalah suatu sistem pembangunan yang memanfaatkan ekosistem laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan (*on a sustainable basis*). Profil pembangunan bidang kelautan dapat dijabarkan ke dalam lima tujuan yang harus dicapai, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, (2) meningkatnya peran sektor kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, (3) peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan, (4) pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungannya, dan (5) peningkatan peran laut

yang kita miliki cukup besar, ternyata kinerja pembangunannya masih jauh dari harapan kita bersama.

Dengan perkataan lain, bahwa selama sebelum masa Kabinet Persatuan dan Kabinet Gotong Royong, telah terjadi *mis-management* (salah urus) pada pembangunan kelautan nasional yang terjadi hampir di seluruh lini (aspek) sistem pembangunan kelautan, sehingga untuk mengatasinya tidak mungkin dapat dilakukan secara sektoral atau parsial saja.

Oleh karena itu, kita perlu membangun kembali pandangan dan cara-cara kita dalam mengelola pembangunan kelautan agar mampu menghantarkan bangsa Indonesia seperti yang kita cita-citakan.

Langkah strategis telah dilakukan dengan pencanangan Gerbang Nina Bahari (Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan) oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Teluk Tomini, 11 Oktober

(*multiplier effects*), dan menyentuh banyak kepentingan masyarakat kecil (*the grass root*).

Keempat, sebagai pendatang baru, 'sektor' kelautan dan perikanan menghadapi beragam kendala dan permasalahan. Oleh sebab itu, tanpa sebuah "Gerakan Nasional", maka realisasi (hasil) pembangunan kelautan dan perikanan akan kecil dan lambat.

Kelima, pengalaman keberhasilan Gerakan Nasional pembangunan industri perdesaan (Semaul Undong) di Korea Selatan, pembangunan pertanian tropis di Thailand, dan keberhasilan BIMAS menjadikan Indonesia sebagai negara "Swasembada Beras" (tahun 1984).

Keenam, wilayah pesisir dan kelautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya alamnya, namun kegiatan pariwisata bahari belum dikelola secara optimal. Pembangunan pariwisata bahari di

Misi Gerbang Mina Bahari adalah melakukan percepatan implementasi pembangunan kelautan dan perikanan untuk mengatasi krisis ekonomi menuju Indonesia yang maju dan makmur melalui pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan.

tersebut ditemukan 150 ribu keping keramik yang berasal dari Dinasti Ming dan 225 keping emas lantakan.

Kemudian juga di perairan Belitung juga pernah dilakukan pengangkatan benda berharga berupa 39.867 keping keramik yang berasal dari Dinasti Tang. Selanjutnya di perairan Tuban juga ditemukan sebanyak 14.800 keping keramik yang diperkirakan berasal dari Dinasti Ming. Nilai selangnya diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.

Pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga asal muatan kapal tenggelam ini perlu mendapatkan perhatian serius, karena selama ini disinyalir terjadi perburuan secara ilegal, sehingga nilai ekonomi yang seharusnya

sebagai pemersatu bangsa.

Jika cita-cita pembangunan kelautan seperti yang kita inginkan di atas dibandingkan dengan pencapaian (kinerja) pembangunan selama ini, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar sektor ini dapat berperan lebih besar dan signifikan guna memperkokoh perekonomian nasional dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur.

Atas dasar potensi pembangunan kelautan yang kita miliki, sesungguhnya peran dan kontribusi sektor kelautan terhadap pembangunan ekonomi nasional masih dapat ditingkatkan. Namun kenyataannya, walaupun potensi sumberdaya kelautan

2003 lalu.

M-TI: Apa alasan dilaksanannya Gerbang Nina Bahari itu?

ROKHMİN: Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Nasional Kelautan dan Perikanan (Gerbang Mina Bahari) didasari beberapa alasan, antara lain : *Pertama*, Indonesia memerlukan langkah terobosan (*breakthrough*) untuk mengatasi krisis ekonomi.

Kedua, sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki potensi besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) untuk keluar dari krisis ekonomi.

Ketiga, pembangunan kelautan dan perikanan dapat menciptakan lapangan kerja baru, membangkitkan banyak efek pengganda

Indonesia diyakini mampu mendorong terbukanya isolasi beberapa daerah yang kurang berkembang.

Ketujuh, Indonesia terdiri atas wilayah kepulauan, sehingga pengembangan jasa transportasi laut di samping mendukung kegiatan perpindahan dan merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah, juga dapat menunjang sektor perdagangan ekonomi. Oleh karenanya pengembangan jasa transportasi laut berperan secara ekonomi, social budaya, politik dan hankam.

M-TI: Apa misi dan tujuan dan sasaran Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan itu?

ROKHMİN: Misi Gerbang Mina Bahari adalah melaku-

kan percepatan implementasi pembangunan kelautan dan perikanan untuk mengatasi krisis ekonomi menuju Indonesia yang maju dan makmur melalui pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Sementara tujuannya antara lain: (1) Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya; (2) Meningkatkan penerimaan devisa negara dan kontribusi terhadap PDB; (3) Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) Meningkatkan konsumsi ikan dan penyediaan bahan baku industri di dalam negeri; dan (5) Memelihara kelestarian sumberdaya hayati perairan beserta ekosistemnya.

Keluaran (*out put*) yang diharapkan melalui Gerbang Mina Bahari ini, akan terjadi percepatan pembangunan kelautan dan perikanan secara sistematis dan terukur, yang dilakukan oleh seluruh unsur, baik yang ada di Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perhubungan, maupun lintas sektoral yang didukung oleh seluruh elemen bangsa guna meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sedangkan sasaran jangka pendek yang ingin dicapai melalui skenario ini, diharapkan produksi perikanan tahun 2006 mencapai 9,5 juta ton, kontribusi pada PDB nasional sebesar 10 %, devisa dari ekspor US\$ 10 milyar, penyerapan tenaga kerja 7,4 juta orang, dan tingkat konsumsi ikan 30 kg/kapita/tahun.

Sasaran tersebut, antara lain akan dicapai melalui program/proyek unggulan, antara lain: (a) Pengembangan industri tambak udang terpadu di 7 propinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Gorontalo (kerjasama Pemda dan PT. CPB);

(b) Pengembangan 5 pabrik industri rumput laut di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Papua; (c) Pengembangan pabrik



MENINJAU PENGADAAN SOLAR UNTUK NELAYAN ■ e-ti/info dkp

chitosan (kerang) di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan;

(d) Pengembangan industri sosis patin di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan; (e) Pengembangan industri perikanan tangkap terpadu di Sabang-Aceh, Batam-Riau, Nias-Sumatera Barat, Bangka-Belitung, NTB, Bitung-Sulawesi Utara, dan Gorontalo;

(f) Pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya di 300 kabupaten dan kota; (g) Pengembangan usaha budidaya kerapu di Bali Barat; dan (h) Penyelamatan kerugian negara US\$ 2-4 miliar dari praktek-praktek ilegal dan pencurian ikan.

Sasaran jangka panjangnya adalah pembangunan sistem bisnis perikanan terpadu di setiap kabupaten/kota pesisir. Di daerah tersebut, akan didirikan pabrik pengolahan ikan sebagai basis industri perikanan. Model tersebut dibangun dengan mengintegrasikan usaha produksi primer (penangkapan dan budidaya) dengan pengolahan/pasca panen serta pemasaran, melalui mekanisme kemitraan antara nelayan/pembudidaya ikan, pengusaha, dan pemerintah.

M-TI: Ditinjau dari aspek proses produksi, tampak jelas terlihat rendahnya produktivitas sektor perikanan. Komentar Anda?

ROKHMİN: Belum optimalnya produksi yang dihasilkan sektor perikanan terutama disebabkan rendahnya produktivitas nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap. Rendahnya produktivitas nelayan disebabkan tiga faktor utama, yaitu *pertama*, sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisional dengan teknologi penangkapan yang tradisional pula, sehingga kapasitas tangkapnya rendah. Hal ini sekaligus mencerminkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia nelayan dan kemampuan Iptek penangkapan ikan.

Kedua, adanya ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antarkawasan perairan laut. Di satu pihak, terdapat kawasan-kawasan perairan yang mengalami kondisi *overfishing*, seperti Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Selat Bali, dan Selatan Sulawesi, dan sebaliknya, masih banyak kawasan perairan laut yang tingkat pemanfaatan sumberdaya ikannya belum optimal atau bahkan belum terjamah sama sekali.

Ketiga, telah terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut, seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (*seagrass beds*), yang padahal mereka itu merupakan tempat (habitat) ikan dan organisme laut lainnya berpijah, mencari makan, atau membesarkan diri (*nursery ground*). Kerusakan lingkungan laut ini juga disebabkan oleh pencemaran baik yang berasal dari kegiatan manusia di darat

maupun di laut.

Sementara itu dalam usaha budidaya perikanan, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas, adalah *pertama*, kemampuan teknologi budidaya (mencakup pemilihan induk, pemijahan, penetasan, pembuahan, pemeliharaan larva, pendederan, pembesaran, manajemen kualitas air, manajemen pemberian pakan, genetika (*breeding*), manajemen kesehatan ikan, dan teknik perkolaman) sebagian besar pembudidaya ikan masih rendah.

Kedua, kompetisi penggunaan ruang (lahan perairan) antara usaha budidaya perikanan dengan kegiatan pembangunan lainnya (pemukiman, industri, pertambangan, dan lainnya) pada umumnya merugikan usaha budidaya perikanan. Belum ada Pemerintah Daerah (propinsi atau kabupaten/kodya) yang menjadikan kawasan budidaya perikanan sebagai kawasan khusus/tertentu, yang harus dilindungi dari segenap upaya konversi lahan atau pencemaran, didalam penyusunan tata ruangnya.

Ketiga, semakin memburuknya kualitas air sumber untuk budidaya perikanan, khususnya di kawasan padat penduduk atau tinggi intensitas pembangunannya, sehubungan dengan berkembangnya kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga (pemukiman dan perkotaan) yang tidak ramah lingkungan atau membuang limbahnya

ke alam (perairan) tanpa memperhatikan ambang batas limbah.

Keempat, struktur dan mekanisme diseminasi teknologi yang lemah, sehingga tingkat inovasi teknologi sulit ditingkatkan. Hal ini disebabkan tiadanya tenaga penyuluh perikanan.

Rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan merupakan masalah yang juga harus mendapat perhatian serius. Hal ini terjadi karena kemampuan teknologi pascapanen produk perikanan yang sesuai dengan selera konsumen dan memenuhi standar mutu internasional masih lemah.

Persoalan lainnya adalah lemahnya kemampuan pemasaran produk perikanan. Pemasaran komoditas perikanan Indonesia, baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk ekspor, sebagian besar masih ditentukan konsumen. Kondisi ini mengakibatkan harga jual produk perikanan pada umumnya kurang menguntungkan produsen, dalam hal ini nelayan atau pembudidaya.

Dua hal yang melatarbelakangi kelemahan ini adalah pertama, lemahnya *market intelligence* yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera konsumen tentang jenis dan mutu produk. Kedua, belum memadainya sarana dan prasarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi produk dari produsen ke konsumen secara tepat waktu. Nelayan pun masih dihadapkan pada panjangnya rantai pemasaran yang harus dilewati dalam proses pembelian faktor-faktor produksi yang berakibat membengkaknya beban harga yang harus dibayar.

Di samping sektor perikanan, pengembangan obyek wisata bahari pun belum berkembang secara optimal. Padahal, Indonesia adalah negeri dengan keindahan alam pesisir dan laut yang luar biasa. Selain keterbatasan modal, minimnya sarana dan prasarana transportasi, jasa pelayanan, promosi, dan faktor eksternal lainnya membuat potensi itu tidak

memiliki nilai ekonomis.

M-TI: Di perairan Indonesia sangat banyak kapal asing berkeliraran dan mereka bisa menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Mengapa hal ini terjadi?

ROKHMIN: Keberadaan kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, karena hal ini telah diatur dalam ketentuan *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) yang menyatakan: negara pantai harus menetapkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber kekayaan hayati di ZEE-nya. Apabila negara pantai belum memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka negara pantai bersangkutan memberi kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkannya

Kondisi demikian disebabkan masih belum optimalnya pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti: (a) Kurangnya sarana dan alat penegakan hukum di laut yang menyebabkan intensitas dan efektifitas monitoring dan pengawasan menjadi berkurang. (b) Pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ditangani oleh berbagai instansi, sehingga memerlukan koordinasi. (c) Belum diberdayakannya petugas pengawasan sumberdaya ikan (WASDI) dan Pengawas Kapal (WASKI) secara optimal.

M-TI: Implementasi dan penegakan hukum (law enforcement) bidang kelautan di Indonesia dinilai masih lemah. Benarkah?

ROKHMIN: Harus diakui implementasi dan penegakan hukum (*law enforcement*)

kejaksaan, dan pengadilan dalam pembangunan kelautan sangat penting dan strategis. Hal ini mengingat banyak kasus yang terjadi dalam pembangunan kelautan dilatarbelakangi oleh persoalan hukum. Contoh muktahir dari pentingnya peran hukum dalam pembangunan kelautan adalah kasus pencurian pasir laut dan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.

Kasus penambangan ilegal pasir laut, merupakan contoh kasus dari persoalan tumpang tindihnya peraturan dan kebijakan. Tumpang tindih peraturan itu membuat kegiatan penambangan membawa berbagai implikasi negatif bagi ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik. Negara dan masyarakat di pesisir dan kepulauan Riau, terutama nelayan yang menyandarkan diri pada kegiatan perikanan hampir selama 22 tahun menderita

Kebanyakan pulau kecil tidak berpenghuni, dan hanya sedikit kegiatan pembangunan.



melalui perjanjian dan sesuai ketentuan persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat armada perikanan Indonesia masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya ikan di ZEE Indonesia dan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 tersebut di atas, Indonesia masih memberi kesempatan kapal ikan berbendera Asing (KIA) beroperasi di ZEEI.

Berkaitan dengan kapal asing, umumnya tidak lepas dari isu tentang "pencurian" ikan oleh nelayan dan kapal asing. Hal ini karena adanya dugaan sebagian besar (70 persen) dari sekitar 7.000 (tujuh ribu) kapal perikanan berbendera Indonesia yang telah memperoleh izin dari pusat untuk beroperasi di perairan ZEEI, ternyata masih dimiliki pihak asing, terutama Thailand, Filipina, Taiwan dan RRC.

bidang kelautan di Indonesia masih lemah. Selama ini persoalan penegakan hukum dan peraturan di laut senantiasa tumpang tindih dan cenderung menciptakan konflik antar sektor pembangunan, institusi dan aparat pemerintah, serta konflik horizontal antar masyarakat.

Oleh karenanya dibutuhkan perangkat hukum dan peraturan yang dapat menjamin interaksi antar sektor yang saling menguntungkan dan menciptakan optimal pareto. Terdapatnya perangkat hukum membutuhkan aparatur penegak hukum yang memiliki komitmen untuk menegakkan peraturan. Tanpa itu semua, persoalan di laut dan pesisir akan menjadi tumpang tindih dan bermuara pada kerusakan lingkungan dan kemiskinan dalam masyarakat.

Peran aparat penegak hukum, seperti TNI/Polri,

kerugian. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalisir sisi kerugian akibat kegiatan penambangan pasir yang tidak terkendali itu. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah adalah menerbitkan Inpres No.2 Tahun 2002. Garis besar Inpres tersebut menginstruksikan kepada pejabat negara terkait untuk berkoordinasi dalam pengawasan dan pengendalian penambangan pasir.

Inpres ini kemudian diperkuat dengan Keppres No.33 Tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut. Dalam keppres itu disebutkan pula tentang pembentukan Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) yang diketuai oleh Menteri kelautan dan Perikanan RI. Tugas dari TP4L ini adalah mengawasi

dan pengendali pengusaha pasir laut.

Dalam mengemban tugas yang diamanatkan, TP4L secara bertahap berhasil meminimalkan praktik ilegal dalam penambangan pasir melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti TNI AL dan polisi. Kapal-kapal yang ditangkap kemudian diseret ke pengadilan, meski pada tahapan ini, proses peradilan belum optimal memberikan sanksi yang berat bagi kegiatan ilegal ini. Namun kemampuan menyeret pelaku ini merupakan langkah yang baik sekali, mengingat hampir 22 tahun kegiatan ilegal ini tidak tersentuh oleh hukum.

Begitu pula halnya dengan masalah praktik penangkapan ikan secara ilegal, khususnya yang beroperasi di perairan ZEEI. Pemerintah telah mengantisipasi praktik tersebut lewat penegakan hukum di wilayah laut. Dalam rangka penegakkan hukum ini dilakukan koordinasi dengan pihak aparat hukum seperti kepolisian, dan TNI-AL. Proses tersebut selanjutnya dilakukan dengan menyeret pelaku pencurian ke pengadilan melalui bekerja sama dengan pihak kejaksaan agar tuntutan hukum atas perkara pelanggaran di bidang perikanan dapat diberikan sanksi yang setimpal dan prosesnya cepat.

Tentunya kegiatan pengendalian penangkapan ikan tidak dapat dilakukan oleh aparat pemerintah saja, melainkan juga harus melibatkan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, DKP telah mengembangkan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) yang disosialisasikan ke beberapa daerah. Pemasangan alat komunikasi dilakukan di sentra-sentra perikanan seperti Pekalongan, Pemangkat, Belitung. Kendar yang dihubungkan ke pusat pemantauan DKP. Sehingga informasi pelanggaran terutama oleh kapal penangkap ikan ilegal dapat diketahui dan diteruskan kepada aparat penegak

hukum di laut. Pada tahun 2001, telah terpasang 15 set alat komunikasi, serta perangkat sistem komputer database yang dioperasikan secara *Wide dan Local Area Net*.

Begitu pula sanksi hukum bagi perusak lingkungan terlalu ringan, seperti bagi pengguna bahan-bahan peledak, bahan beracun (*cyanida*), dan juga aktivitas penambangan karang untuk bahan bangunan, reklamasi

kurangnya koordinasi dan kerja sama antarpelaku pembangunan dan sekaligus pengelola di kawasan tersebut, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kurangnya koordinasi antarpelaku pengelola terlihat dalam berbagai kegiatan pembangunan di kawasan pesisir dan laut yang dilakukan secara sektoral oleh masing-masing pihak. Lemahnya koordinasi ini diakibatkan oleh belum

sektor perekonomian lainnya tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu akibat kebijakan sektor-sektor perekonomian tersebut tidak berorientasi atau tidak berkoordinasi dengan sektor kelautan. Sehingga sektor-sektor perekonomian lain yang terkait tersebut juga tidak tumbuh dan berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

M-TI: Dengan banyaknya masalah di sektor kelautan, bagaimana masa depan sektor ini?

ROKHMİN: Apabila pola dan praktik pembangunan kelautan tidak segera diperbaiki, maka harapan kita untuk menjadikan bidang kelautan sebagai tulang punggung (*prime mover*) pembangunan nasional untuk keluar dari krisis ekonomi berkepanjangan dan sekaligus menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, makmur, mandiri dan berkeadilan akan sia-sia belaka. Sebaliknya, kita hanya akan mewariskan kepada generasi penerus, sebuah kondisi ekosistem pesisir dan lautan dengan kekayaan alam yang terkuras habis serta menurunnya kemampuan alam dalam mendukung pembangunan (*sustainable capacity*). Kegagalan kita dalam mempertahankan kapasitas keberlanjutan seperti yang terjadi di sektor sumberdaya alam di darat (hutan dan lahan pertanian) bukan tidak mustahil dapat terulang di bidang kelautan.

Beranjak dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka sudah saatnya kita melakukan reorientasi (pembaharuan) paradigma pembangunan Indonesia. Reorientasi tersebut mencakup dua hal mendasar. *Pertama*, adalah reorientasi fokus pembangunan, dari basis sumberdaya daratan ke basis sumberdaya kelautan. Ini bukan berarti mengenyampingkan pembangunan



ROKHMİN MEMPERHATIKAN UDANG HASIL BUDIDAYA ■ e-ti/info dkp

pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung jawab, dan seterusnya.

Masih maraknya kegiatan bersifat destruktif, yang tidak hanya dilakukan oleh nelayan tradisional, tetapi juga nelayan-nelayan modern, dan nelayan-nelayan asing yang banyak melakukan pencurian ikan di perairan nusantara. Fakta ini merupakan bukti lemahnya penegakan hukum.

M-TI: Tumpang tindihnya penanganan masalah ini menandakan lemahnya koordinasi unsur terkait?

ROKHMİN: Memang, permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan adalah

adanya sistem atau lembaga yang mampu mengkoordinasikan setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan.

Beberapa contoh dapat dilihat seperti terjadi benturan kepentingan antara pemanfaatan sumberdaya kelautan dengan kegiatan konservasi lingkungan, antara pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan lestari dengan pemanfaatan sumberdaya secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Akibatnya, sektor kelautan yang memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) dengan sektor-

Diharapkan produksi perikanan tahun 2006 mencapai 9,5 juta ton, kontribusi pada PDB nasional sebesar 10 %, devisa dari ekspor US\$ 10 milyar, penyerapan tenaga kerja 7,4 juta orang, dan tingkat konsumsi ikan 30 kg/kapita/tahun.

di darat, tetapi berbagai kegiatan pembangunan di darat hendaknya bersifat sinergis dan saling memperkuat dengan kegiatan-kegiatan pembangunan di kawasan pesisir dan lautan.

Kedua, adalah bahwa tujuan pembangunan kelautan hendaknya tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran), pemerataan kesejahteraan (*social equity*), dan terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir serta lautan secara seimbang (proporsional). Laut tidak lagi dipersepsikan sebagai keranjang sampah (tempat pembuangan limbah dari darat) dan ajang ekstraksi sumber daya alam secara berlebihan, tetapi sebagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia.

M-TI: Dalam era reformasi, banyak perubahan dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan. Di antaranya paradigma pembangunan yang bersifat sentralistik mengalami koreksi dengan munculnya lingkungan strategi baru berupa pendekatan pembangunan yang bersifat desentralistik yakni otonomi daerah. Apa saja konsekuensi dari otonomi daerah ini dalam kaitannya dengan sektor kelautan dan perikanan?

ROKHMİN: Perubahan ini membawa konsekuensi berupa pendelegasian kewenangan pemerintahan dari pusat ke daerah. Perubahan yang kemudian dikenal dengan otonomi daerah (otda) itu, merupakan paradigma baru pengelolaan pemerintahan dan dipandang sebagai koreksi atas segala bentuk pemusatan kekuasaan yang telah menggiring rakyat Indonesia ke dalam kesenjangan sosial ekonomi, baik yang berupa kesenjangan antargolongan, antarsektor ekonomi, maupun antara pusat dan daerah.

Munculnya otda tidak lepas dari tuntutan keadilan dan perbaikan nasib rakyat, khususnya di daerah untuk meningkatkan taraf hidup, penghargaan atas kondisi

sosial dan budaya lokal, dan kelestarian lingkungan.

Perubahan itu mempengaruhi secara langsung bentuk-bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan. Munculnya UU Nomor 22/ 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, telah menggeser kewenangan pengelolaan wilayah laut dari pemerintah pusat ke daerah. Pergeseran ini membawa berbagai konsekuensi dalam pembangunan kelautan yang efisien, adil dan berkelanjutan.

Keadaan yang patut dicermati adalah pasal-pasal yang mengatur kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut di dalam skenario otda. Pada Pasal 10, disebutkan bahwa propinsi memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai, sementara kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut sejauh sepertiga dari batas kewenangan propinsi atau sejauh 4 mil laut. Kewenangan tersebut mencakup pengaturan kegiatan-kegiatan eksplorasi, eksploitasi konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.

Kewenangan tersebut terwujud dalam bentuk pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, serta penegakan hukum. Munculnya undang-undang ini membawa konsekuensi-konsekuensi berupa perubahan dalam tata pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan.

Pergeseran pengelolaan ini bukan tanpa persoalan karena akan berdampak pada masalah yang berkaitan langsung dengan institusionalisasi otda. Persoalan institusional ini dalam konteks wilayah laut di antaranya adalah:

Pertama, belum adanya institusi/lembaga pengelola khusus yang menangani masalah pengembangan pesisir dan laut. Implikasinya, tidak tersedianya instrumen hukum wilayah perbatasan antar propinsi (RT/RW, zonasi), yang dapat diketahui masyarakat luas, khususnya dunia usaha dan investasi. Selain itu, belum lengkapnya pedoman bagi instansi di daerah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam memanfaatkan wilayah laut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BERDIALOG DENGAN NELAYAN ■ e-ti/info dkp

Kedua, keterbatasan SDM (aparatur pemerintahan) dalam bidang pesisir dan laut. Ini menimbulkan kesulitan dalam pendayagunaan serta peningkatan perangkat instansi daerah yang ada terhadap pengelolaan di wilayah pesisir dan 12 mil laut serta 4 mil laut yang merupakan kewenangan kabupaten/kota. Sebagai contoh adalah kesiapan regulasi tentang pemanfaatan lahan pesisir untuk kegiatan pembangunan (pariwisata, permukiman dan lain sebagainya), pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut, pengaturan alur pelayaran; dan lain-lainnya.

Ketiga, keterbatasan data dan informasi, telah menyebabkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan dan mengelola data dan informasi menjadi rendah.

Keempat, terbatasnya wahana dan sarana dalam penerapan dan pendayagunaan teknologi bidang kelautan. Akibatnya, upaya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumberdaya kelautan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum bisa terwujud.

Dengan adanya pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dalam batas-batas yang telah ditetapkan, maka sangat jelas manfaat dari sumberdaya kelautan itu akan dirasakan Pemda dan masyarakat setempat. Berdasarkan otonomi daerah ini, Pemda sudah memiliki landasan yang kuat untuk

mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu, mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dalam upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan.

M-TI: Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah seberapa besar keinginan dan komitmen Pemda untuk mengelola sumberdaya kelautan secara berkelanjutan yang berada dalam wewenang dan kekuasaannya?

ROKHMİN: Pertanyaan ini penting mengingat tidak seluruh daerah memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan.

Isyarat pembangunan berkelanjutan dalam undang-undang ini seperti tersirat dalam pasal 10 ayat 1, daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundangan. Oleh karena itu, dalam pendayagunaan sumberdaya alam tersebut haruslah dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab disesuaikan dengan kemampuan daya dukungnya dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat serta harus memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. □ **m-ti/ch.robin-yusak-yayat**

JAYASUPRANA

Si Multitalent Pencetus Kelirumologi



JAYA SUPRANA ■ e-urip internet

Pendiri Museum Rekor MURI dan pencetus kelirumologi ini mempunyai beragam predikat – mulai dari pengusaha, pembicara, presenter, penulis, kartunis, pemain piano hingga pencipta lagu – yang diakui oleh lembaga tingkat dunia seperti Die Welt, Los Angeles Times, The Guardian, Wall Street Journal, dan Straits Time.

Jaya Suprana, orang Tionghoa yang besar dalam budaya Jawa. Pria bertubuh tambun dan berkacamata tebal yang lahir di Denpasar, 27 Januari 1949 ini akrab di hadapan publik lewat acara televisi *Jaya Suprana Show* di TPI.

Semasa muda, Jaya pernah menjadi pedagang buku bekas di Semarang pada tahun 65-an. Bahkan ketika sekolah di Jerman ia tak sungkan menjadi tukang bubut, tukang pasang ubin, atau menjadi pegawai kafe-taria mahasiswa. Sepulang belajar di Jerman ia menjadi Manajer Pemasaran Jamu Jago, sebelum naik jabatan sebagai presiden direktur.

Setelah sekitar delapan tahun menjadi direktur di perusahaan jamu yang diwarisinya dari keluarga - yang berdiri sejak tahun 1918 - Jaya beralih ke posisi presiden komisaris. Kini, tugasnya hanya mengarahkan GBHP (Garis Besar Haluan Perusahaan) dan mengawasi kinerja perusahaannya.

Dalam berbagai kesempatan, Jaya selalu muncul bersama tokoh-tokoh politik kelas wahid di negeri ini. Meskipun begitu, Jaya tidak tertarik pada urusan politik. Di samping itu, ayahnya juga pernah berpesan agar Jaya tidak terjun ke dunia politik

karena politik pada prakteknya justru sering menjadi berhalal dan menguasai makhluk tertinggi ciptaan Tuhan itu.

Pada 27 Januari 1990, ia mendirikan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai bagian dari visi ke depannya untuk menghimpun semua prestasi, perilaku dan kegiatan yang unik, langka, dan kreatif. Museum yang selokasi dengan Museum Jamu Jago ini sudah menjadi objek wisata resmi Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sebagai seorang pemikir dan penulis, Jaya mengobok-obok berbagai literatur dan media untuk mempelajari kekeliruan dan kesalahkapan yang telah dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari. Hingga akhirnya, ia memelopori istilah kelirumologi dan melahirkan buku berjudul *Kaleidoskopi Kelirumologi*, yang mengajak pembaca untuk lebih peka terhadap hal-hal yang dianggap benar padahal salah di tengah-tengah masyarakat. Misalkan saja, semboyan yang dipercaya masyarakat - *mens sana in corpore sano* (di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat). Jaya mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat, belum tentu hadir jiwa yang sehat. Jaya memberi contoh Mike Tyson atau penghuni

Rumah Sakit Jiwa, bertubuh sehat tapi jiwanya sakit.

Berkat kerja keras dan ketekunannya, ia memperoleh puluhan penghargaan nasional maupun internasional. Yakni, dalam bidang seni musik (dari *Freundeskreis des Konservatoriums Muenster*, Jerman, dan dari Pangeran Bernhard, Belanda); kebudayaan (Budaya Bhakti Upapra-dana); komputer (*Best in Personal Computing Award 1995* dari Apple Macintosh Inc.); industri-bisnis (*The Best Executive Award 1998*), prestasi perusahaan (*Trade Leader's Club, Madrid*, dan *Institut pour Selection de la Qualite, Belgia*); lingkungan hidup (Sahwali Award 1997); kemanusiaan (Duta Kemanusiaan 1991-1992 Palang Merah Indonesia) dan lain-lain.

Sebagai kartunis, lulusan *Musikhochschule Muenster* dan *Folkwanghochschule Essen*, Jerman ini telah menggelar karyanya di Jerman, Norwegia, dan Indonesia sendiri. Sedangkan untuk urusan musik, selama ini Jaya dikenal sebagai komponis dan pianis andal yang sudah tampil di berbagai negara di Eropa, Amerika, Aljazair, Selandia Baru, dan lain-lain.

Pendidikan musik yang ditekuninya selama lima tahun membuat Jaya mampu

melahirkan karya-karyanya sendiri. Ia tampil pertama kali dalam resital piano tunggal tahun 1981 di Taman Ismail Marzuki. Penampilan keduanya digelar di Erasmus Huis untuk merayakan 50 tahun usia Yayasan Pendidikan Musik (YPM). Di bidang kemanusiaan, ia ikut memelopori program donor ginjal jenazah di Indonesia.

Pada pertengahan 2003 lalu, Jaya memelopori iklan layanan masyarakat 'Indonesia Pusaka' dan membuat program berdurasi 60 menit 'Di Balik Adegan Indonesia Pusaka' yang ditayangkan di TPI di rumah produksi Jatayu Cakrawala Film.

Iklan layanan masyarakat 'Indonesia Pusaka' yang dibuat dalam rangka menyambut Satu Abad Bung Hatta ini merekam lebih dari 20 figur, sebagian tokoh ternama, menyanyikan lagu kesayangan Bung Hatta, yakni *Indonesia Pusaka* ciptaan Ismail Marzuki. Tokoh-tokoh ternama yang berhasil 'dikumpulkan' antara lain Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Ketua MPR Amien Rais, dan sejumlah menteri dan mantan menteri. Waktu itu, pada setiap sesi rekaman masing-masing tokoh, Jaya sibuk pula berfungsi sebagai pelatih penyanyi kilat, konduktor, penata musik, sekaligus editor.

Kini, di usianya yang semakin senja, tanpa seorang anak, Jaya tetap berkarya, berbuat kebaikan dan suka memberi. Ia mengangkat anak asuh dan mendirikan Panti Asuhan Rotary-Suprana. Di atas tanah warisan almarhumah ibunya, Lily Suprana, seluas 900 m² di kawasan Candi Baru, Semarang, kini tinggal sekitar 10 orang anak. Semuanya lelaki.

Sifat suka memberi tidak lepas dari didikan keras sang ayah, Lambang Suprana, yang mengajarnya untuk tidak memberhalakan kekayaan dan sadar bahwa harkat dan martabat manusia bukan diukur dari kekayaan harta bendanya, namun dari kekayaan akhlak dan imannya. Itulah mengapa, Jaya tidak ambil pusing tentang masa tuanya, karena ia tinggal 'menunggu mati' dan siap pergi ke surga. □ e-ti

CHRISTIAN HADINATA

Legenda Hidup Bulutangkis Indonesia



CHRISTIAN HADINATA ■ e-ikompas

Nama Christian Hadinata layak menjadi simbol kekuatan bulutangkis Indonesia. Dia adalah legenda hidup yang berhasil mengukir prestasi internasional baik ketika menjadi pemain, pelatih, maupun saat ini sebagai pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia.

Lahir di Purwokerto, 11 Desember 1949, Christian tidak menyangka akan menjadi pebulutangkis andal. Waktu kecil, cita-citanya justru menjadi pemain sepakbola. Sebagai keluarga sederhana, Christian merasa bulutangkis adalah olahraga yang mahal. Untuk bermain diperlukan raket, senar, sepatu, dan shuttlecock. Hal itu belum ditambah dengan biaya menyewa tempat latihan.

Sampai lulus SMA di Purwokerto, ia belum tertarik dengan bulutangkis. Padahal, saat itu usianya sudah 16 tahun, usia yang cukup tua untuk memulai olahraga sebagai prestasi.

Setelah lulus SMA, ia diajak kakak sulungnya tinggal di Bandung. Di sanalah ia dimodali sang kakak untuk bermain bulutangkis, dan ia pun masuk klub Mutiara. Suatu kali ia diajak kakak sulungnya itu ke Jembatan Semanggi (Jakarta) untuk melihat Stadion Senayan. Ketika ia ingin mendekati menuju Stadion itu, kakaknya bilang, "Sudah, dari jauh saja, nanti juga engkau akan ke sana."

Prestasi emas dicetak pertama kali tahun 1971 sebagai pemain ganda putra dan ganda campuran. Di ganda putra berpasangan

dengan Atik Jauhari menjadi juara nasional. Sedangkan di ganda campuran menjadi juara Asia berpasangan dengan Retno Kustijah.

Selanjutnya, dengan berganti-ganti pasangan, Christian dapat mencapai prestasi terbaik, dengan Ade Chandra menjuarai Asian Games 1978, All England 1972 dan 1973, serta juara dunia 1980. Bersama Boby Ertanto juara di All England 1983 dan Indonesia Terbuka 1984. Dengan Lius Pongoh menang di Jepang Terbuka 1981. Berpasangan dengan Imelda Wiguna memenangi All England 1979 dan juara dunia 1980. Main bersama Ivana Lie berjaya di Asian Games 1982, Indonesia Terbuka 1984 dan Piala Dunia 1985. Sepanjang enam kali memperkuat Tim Piala Thomas (1972-1986), ia bersama pasangannya (siapa pun dia) selalu merebut poin. Di ajang beregu itu ia pernah berjodoh dengan Hadibowo dan Liem Swie King.

Pada tahun 1986 atau dalam usia 37 tahun ia pensiun sebagai pemain. Usia 37 adalah usia yang cukup tua untuk ukuran atlet bulutangkis. Hanya atlet tertentu yang rajin menjaga penampilan saja mampu bertahan di usia setua itu.

Setelah gantung raket, ia beralih menjadi pelatih. Ia

ingin mewariskan tradisinya: "menjadi pemain terbaik" kepada anak-anak asuhnya. Dari tangannya lahir pasangan Ricky Achmad Subagdja/Rexy Mainaky, Gunawan/Bambang Suprianto, dan Denny Kantono/Antonius. Ia juga ikut membentuk Candra Wijaya/Sigit Budiarto, Tony Gunawan/Halim Haryanto, yang dengan kombinasi pasangannya telah merebut emas di Olimpiade 2000 dan dua gelar juara dunia, tahun 1997 dan 2001, serta memberi fondasi yang kuat bagi para pemain muda saat ini.

Kemenangan Tim Piala Thomas Indonesia bulan Mei 2002 di Guangzhou semakin lengkap saat Christian Hadinata melangkah ke podium kehormatan dalam upacara yang khusus digelar baginya. Komposisi *Pomp and Circumstances* March karya Edward William Elgar (1857-1934) yang mengalun terasa megah mengiringi pengnugrahan *Hall of Fame* (penghargaan tertinggi bulu tangkis) oleh Presiden IBF Korn Dabransi.

Christian adalah orang Indonesia ketiga penerima penghargaan itu setelah Rudi Hartono dan Dick Sudirman. Atas penghargaan itu ia bersyukur pada Tuhan karena diberi berkat dan anugerah bisa bermain bulu tangkis. Itu adalah sebuah

proses yang panjang, mulai dari menjadi atlet, pelatih, hingga menjadi pengurus. Ia juga berterima kasih kepada PBSI yang sudah memberikan fasilitas kepadanya untuk menjadi atlet, pelatih, dan pengurus. Semua itu merupakan pendorong motivasi dalam karirnya.

Meskipun telah mencapai prestasi tertinggi, baik sebagai pemain, pelatih dan pengurus, ia merasa belum sampai pada batas maksimal. Dari segi pribadi, ia merasa belum merasa penuh (*fulfilled*). Justru pada saat ini bulu tangkis dalam negeri cenderung dalam penurunan prestasi. Gambaran utuh prestasi itu bukan hanya supremasi di Piala Thomas. Piala Uber belum direbut, Piala Sudirman hanya sekali diraih yaitu di Jakarta tahun 1989. Masih ada gap antara pemain putra dan putri dengan kekuatan yang tidak merata. Ia sebagai bagian yang turut bertanggung jawab di pelatnas mengaku masih tidak puas atas pencapaian saat ini. Semuanya masih belum *all out*. Masih banyak lubang yang harus dibersihkan.

Pribadi Christian dikenal sebagai sosok yang sederhana namun berkemauan keras dan tidak pernah puas. Itu yang membuatnya selalu belajar. Belajar menjadi pelatih yang baik, belajar mengurus organisasi dengan benar, memikirkan konsep pembinaan bulu tangkis yang ideal dan bahkan, belajar menghadapi wartawan dan menyampaikan pernyataan dengan lugas dan utuh sehingga tidak ada ruang bagi tumbuhnya spekulasi.

Proses belajar itu tidak selalu mulus. Terkadang, ia menemui benturan dan konflik dengan orang lain termasuk dengan pengurus dan pelatih di lingkungan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Bila sudah begitu, ayah dua anak, Mario (20) dan Mariska Hadinata (19) dan suami Yoke Anwar, ini memilih berintrospeksi dan berusaha memperbaiki diri lebih dulu.

Kesederhanaan itu ditunjukkannya dengan lebih mengutamakan pengabdian dan mencetak prestasi ketimbang mencari penghasilan yang lebih menjanjikan secara finansial. □ e-ti



Arnold Alois Schwarzenegger TERMINATOR MENJADI GUBERNUR

Dalam kurun waktu 20 tahun, publik mengenalnya melalui film laga *box-office* seperti *Total Recall*, *True Lies* dan *Terminator*, yang meledak di bioskop-bioskop dunia. Namun, kini ia juga dikenal sebagai Gubernur ke-38 sebuah negara bagian terbesar dan terkuat di Negeri Paman Sam, California.

Bintang Hollywood kelahiran Austria bernama Arnold Alois Schwarzenegger ini berhasil memenangkan pemilihan gubernur California di Los Angeles, Amerika Serikat, 7 Oktober 2003, dan dilantik pada November 2003. Ia menyingkirkan 135 kandidat lainnya seperti Gubernur Gray Davis yang sudah dua periode menjabat sebagai gubernur; Larry Flynt, penerbit majalah porno *Hustler*; Arianna Huffington, komentator politik dari kekuatan independen, dan sebagainya. Keputusannya untuk masuk ke dunia politik menjadikannya sebagai bintang layar lebar kedua setelah Ronald Reagan yang juga sukses menjadi gubernur.

Jauh sebelum menjadi gubernur seperti sekarang, Arnold harus berjuang dan meniti karir dari bawah. Di usianya yang masih muda, Arnold mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi binaragawan terbesar dalam sejarah. Ia berlatih keras dan memaksakan dirinya berlatih hingga batas maksimal kemampuan tubuhnya. Mimpinya akhirnya terwujud tahun 1967 di mana Arnold yang waktu itu berusia 20 tahun, berhasil menang dalam kontes Mr. Universe. Kini, ia sudah menggondol lima gelar Mr. Universe dan tujuh gelar Mr. Olympia.

Tahun 1968, Arnold pindah ke Amerika Serikat coba mengadu nasib bermodalkan tubuh yang kekar-bugar sembari belajar di Universitas Wisconsin mengambil jurusan ekonomi dan bisnis. Lima belas tahun kemudian setelah kepindahannya ke AS, Arnold

menjadi warga negara AS. Setelah lulus, ia menginvestasikan uang pendapatan dari kontes yang dimenangkannya dalam berbagai proyek real estat dan perusahaan perlengkapan olahraga. Sekitar tahun 70-an, Arnold mulai berakting dalam beberapa film. Ia berakting dalam film petualangan berjudul *Hercules in New York* tahun 1970. Beberapa tahun kemudian setelah berjuang mencari pekerjaan yang layak di dunia perfilman, ia kemudian berakting dalam *Stay Hungry* (1976). Berkat film ini, ia mendapat

penghargaan Golden Globe Award sebagai artis pendatang baru.

Pada awal tahun 80-an, ia berakting dalam film *Conan the Barbarian* (1981) dan *Conan the Destroyer* (1984). Aksennya yang kental dan bentuk tubuhnya yang berotot semakin mengangkat namanya dalam film *The Terminator* (1984). Kalimat-kalimat khasnya di film-film yang ia bintang, seperti "I'll be back" dan "asta la vista", kini menjadi frasa paling populer di AS dan menjadi senjata andalan dalam membangkitkan antusiasme pendukungnya.

Pada 1977, ia bertemu dengan Maria Shriver, seorang jurnalis televisi, keponakan mantan presiden AS John F. Kennedy. Setelah melalui masa perkenalan yang cukup lama, mereka akhirnya menikah tahun 1986 dan kini mempunyai empat orang anak.

Meskipun selama ini dikenal dunia sebagai insan Hollywood, Arnold sebenarnya tidak awam politik dan bukan orang baru dalam dunia politik. Dalam periode 1991-1999, Arnold aktif di Partai Republik, berurusan dengan olahraga dan mendirikan yayasan yang mendukung aktivitas ekstrakurikuler anak sekolah. Ia juga aktif menggalang dana untuk Partai Politik asal Presiden AS George Walker Bush ini. Selain itu, Arnold sering terlibat dalam perdebatan isu-isu politik seperti masalah aborsi, hak kaum gay, lingkungan dan impeachment.

Keputusannya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur disampaikannya dalam salah satu acara televisi lokal *Tonight Show* yang

Mira Lesmana Produser Bertangan Dingin

Dosen Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta ini mendirikan rumah produksi Miles Productions (MP) pada 1996. Lewat MP, ia menghasilkan karya perdana, dokudrama *Anak Seribu Pulau* – program televisi sepanjang 14 episode pada 1997. Meskipun ia pernah menyutradarai salah satu segmen film *Kuldesak* (1998), justru kiprahnya sebagai produserlah yang lebih menonjol.

Tahun 2000, MP memproduksi *Petualangan Sherina* yang berhasil menyedot jutaan penonton. Dua tahun kemudian ia mendulang sukses lewat film *Ada Apa Dengan Cinta* (A2DC) yang berhasil menggaet lebih dari 1,6 juta penonton. Setelah itu, Mira bersama kawan-kawannya memproduksi *Eliana*, *Eliana* (2002) dan *Rumah Ke Tujuh* (2003).

Meskipun film *Eliana*, Eliana kurang mendapat sambutan di tanah air, film ini rupanya memperoleh penghargaan untuk kategori "Best Young Cinema" dan "Best Critics Cinema" di ajang Festival Film Internasional Singapura, April 2002 dan meraih predikat "Special Mention" untuk kategori penghargaan "Dragons and Tigers for Young Cinema" di ajang Festival Film Internasional Vancouver di Kanada, Oktober 2002. Tidak cukup di dunia layar lebar, ibu dua anak, Galih dan Kafka, ini juga kembali menggarap program untuk layar kaca seperti *Bengkel*, *Bekisar Merah*, *Pria Idaman* dan *Perayaan Besar* dalam rangka menyambut HUT ke-13 SCTV. **e-t**



dipandu Jay Leno di TV NBC, sebuah acara yang banyak ditonton publik AS. Di acara yang sama pula, setelah kemenangannya, ia berserta istri dan sebagian besar keluarga Shriver dari klan Kennedy menyampaikan terima kasihnya kepada para pendukung mereka. Hal yang unik dalam kampanyenya adalah kenyataan bahwa istrinya berasal dari keluarga besar Partai Demokrat sedangkan Arnold menjadi kandidat gubernur asal Partai Republik. Rupanya perbedaan tidak menghalangi suami-isteri ini untuk menggalang kekuatan memenangkan pemilihan.

Dalam kampanyenya, Arnold yang akrab dipanggil Arnie ini aktif memberitarkan kiprahnya selama 10 tahun terakhir untuk memajukan program pendidikan di luar jam sekolah bagi anak-anak California. Menurutnya, pendidikan anak-anak dan generasi muda merupakan hal terpenting. Pernyataannya ini juga didukung oleh isterinya, Maria Shriver, yang mengatakan bahwa selama 30 tahun terakhir, Arnold mencurahkan hidupnya untuk anak-anak, kalangan tak beruntung, para pendidik, dan banyak kalangan lainnya.

Dari segi finansial, Arnold tidak menemukan masalah yang berarti untuk membiayai kampanyenya. Di antara seluruh kandidat yang mendaftar, Arnold adalah kandidat terkaya. Dalam daftar kekayaan wajib pajak yang dirilis untuk 2000 dan 2001, dia memperoleh penghasilan total hingga USD 57 juta. Menurut CNN, USD 742 ribu disumbangkan Arnold ke yayasan amal pada 2000, lantas USD 4,1 juta pada 2001 termasuk untuk korban teror 11 September di New York.

Aktor film laga ini juga memiliki saham di berbagai perusahaan antara lain di Starbucks, PepsiCo, Coca Cola, dan Roto Rooter. Ia juga memiliki jutaan dollar kekayaan dalam bentuk obligasi pemerintah kota serta investasi di bidang real estat. Dengan uang itu, Arnold bisa mengungguli Larry Flynt, penerbit majalah porno Hustler yang tahun lalu dinyatakan mempunyai penghasilan USD 10 juta dari penerbitan majalah dan bisnis patungan real estat. Itulah mengapa dalam berbagai pidato kampanyenya, Arnold dengan percaya diri mengatakan bahwa ia tak bisa disuap demi kepentingan-kepentingan tertentu.

Kini, Arnold sebagai Gubernur California harus 'bertempur' mengatasi ganasnya musuh kesulitan ekonomi dan sosial yang sulit dibasmi. Ia juga harus merealisasikan janji-janji yang pernah dijualnya dalam kampanye seperti memulihkan perekonomian tanpa menaikkan pajak, menciptakan lapangan kerja, pemerintahan yang baik (*good governance*), menggairahkan kegiatan bisnis, membantu anak-anak, serta lebih meningkatkan pendidikan. □ **e-ti/atur**



MAJALAH BIOGRAFI TokohIndonesia

PERTAMA DAN SATU-SATUNYA DI INDONESIA

Tersedia di Toko-toko Buku

**Gramedia
Gunung Agung
Gunung Mulia**

Juga di agen-agen di kota-kota besar seluruh Indonesia. Atau hubungi Distributor kami:

Kedarton Agency

di Stasiun Senen, Jakarta

Telepon 021-9119176

Atau langsung ke

Bagian Sirkulasi

e-mail: sirkulasi@tokohindonesia.com

telepon/fax:

021-83701736

021-9101871

Pesan sekarang juga.

Harga Rp.14.000,-

Luar Jabotabek Rp.15.000



CORRY DAN GLORIA ■ e-tldok

Gloria Macapagal-Arroyo

Perempuan Piawai dalam Dunia Politik

Presiden Philipina Gloria Macapagal-Arroyo adalah orang yang telah banyak memakan asam-garam dalam berbagai bidang, termasuk politik. Pada awal karier politiknya saja ia sudah terpilih sebagai senator, dan kembali terpilih pada tahun 1995 oleh lebih dari 16 juta pemilih. Jumlah pemilih terbesar dalam sejarah Philipina. Ia kemudian terpilih menjadi wakil presiden Philipina pada tahun 1998 oleh 13 juta rakyat Philipina, amanat rakyat terbesar dalam sejarah pemilihan langsung presiden dan wakil presiden di Philipina.

Dia diangkat sumpah menjadi presiden Philipina ke-14 pada tanggal 20 Januari 2001 oleh Ketua Mahkamah Agung Philipina Hilario Davide Jr, setelah Mahkamah Agung secara bulat menyatakan bahwa posisi kepresidenan kosong. Ia adalah wanita kedua Philipina yang naik menjadi presiden melalui revolusi damai kekuatan rakyat.

Gloria lahir pada tanggal 5 April 1947, ia adalah putri mantan Presiden Diosdado Macapagal, seorang keturunan Lakandula yang



GLORIA M-ARROYO ■ e-tldok

dikenal dengan sebutan "Anak miskin dari Lubao" di provinsi Pampanga. Ibunya adalah Dr. Evangelina Macaraeg-Macapagal dari Binalonan, Pangasinan. Keluarga ini dikenal dengan integritasnya dan kehidupan yang terhormat serta

sederhana. Di bawah pemerintahan Diosdado Macapagal, Philipina pernah mengalami pertumbuhan ekonomi terbaik di Asia setelah Jepang.

Gloria memegang kuat standar pendidikan yang tinggi dari orangtuanya. Ia lulus sebagai lulusan terbaik dari sekolah putri kebiaraan. Secara konsisten ia masuk dalam daftar dekan selama dua tahun tugas kuliahnya di Universitas Georgetown, Washington DC. Di masa kuliahnya ia satu kelas dengan mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Ia lulus dengan predikat magna cum laude dari perguruan tinggi sebagai Sarjana Ilmu Perniagaan. Kemudian ia memperoleh magister ekonomi dari Universitas Ateneo de Manila dan gelar Ph.D dalam bidang ekonomi dari Universitas Philipina.

Presiden Gloria Macapagal-Arroyo memulai karir profesionalnya sebagai dosen di Perguruan Tinggi Assumption. Kemudian ia menjadi asisten profesor di Universitas Ateneo de Manila dan penceramah senior di Sekolah Tinggi Ekonomi UP.

Gloria memasuki dinas pegawai negeri sebagai asisten sekretariat Departemen Perdagangan dan Perindustrian pada masa kepresidenan Aquino. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Dewan Pengurus Ekspor bidang Garmen dan Tekstil Philipina. Saat itu ia yang membawa industri tersebut sebagai penjarang penerimaan dollar terbesar di Philipina, dan mengangkat citranya menjadi Menteri Muda Perdagangan dan Industri. Selama masa jabatannya di senat, ia telah ikut menyusun 55 peraturan di bidang ekonomi dan reformasi sosial. Oleh karena pengabdian dan dedikasinya, ia beberapa kali dianugerahi sebagai Senator terbaik.

Ketika ia terpilih sebagai wakil presiden, Presiden Joseph Estrada menunjuknya sebagai Sekretaris Bersama Kesejahteraan dan Pengembangan Sosial, posisi yang ia pegang sampai pengunduran dirinya dari kabinet tanggal 12 Oktober 2000.

Presiden Arroyo menikah dengan seorang pengacara yang juga pengusaha yaitu Jose Miguel Tuason Arroyo dari Binalbagan, Negros Occidental, cucu dari almarhum Senator Jose Ma Arroyo dari Iloilo. Mereka dianugerahi tiga orang anak yaitu, Mikey, Luli dan Dato. □ **e-ti/mlp** dari berbagai sumber.

Tempat Anda Membeli

MAJALAH BIOGRAFI TokohIndonesia

MAJALAH BERBASIS ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
url: www.tokohindonesia.com - www.e-ti.com
PERTAMA DAN SATU-SATUNYA DI INDONESIA

Distributor Toko Buku:

■ PT. CENTRAL KUMALA SAKTI

Komplek Green Ville Blok BG No.67
Jakarta Telp. (021) 5640185, 5658088

TB. GRAMEDIA

- Taman Anggrek Mall ■ Citraland Mall
- Pondok Indah Mall ■ Mega Mall, Pluit
- Hero Gatot Subroto ■ Melawai
- Matraman ■ Kelapa Gading Mall
- Cempaka Mas ■ Pintu Air
- Gajah Mada ■ Cinere Mall ■ Metropolitan Mall, Bekasi
- Bintaro Plaza ■ Mahkota Mas, Tangerang
- Karawachi Mall, Tangerang
- Daan Mogot Mall, Tangerang

TB. GUNUNG AGUNG

- Taman Anggrek Mall ■ Pondok Gede
- Blok M Plaza ■ Kwitang 6 ■ Kwitang 38
- Blok M Plaza ■ Kramat Jati Indah
- Atrium Plaza ■ Tambun ■ Jl. Ir. Juanda, Bekasi
- Arion Plaza ■ Depok Plaza
- Citraland Mall ■ Sunter Mall ■ Hero Tendea ■ Trisakti

OFFICE

- Ambassador Mall ■ Ranch Market, Kb. Jeruk ■ Cimone

TB. GUNUNG MULIA

- Jalan Kwitang

Distributor Agen:

■ KEDARTON AGENCY

Stasiun Senen, Jakarta Telp. 021-9119176

AGEN UTAMA

- KPA, Terminal Senen, Tlp.42877451
- MARLIN, Stasiun KA Senen, 08129956840
- HARIAN JAYA, Cawang, 08128309471
- ANTO'S, Kalimalang, 08129256715
- DAVID OXTO, Stasiun KA Senen, 9119180
- PURBA ST, Stasiun KA Senen, 0816974343
- TAMORA, Stasiun KA Senen, 9119175
- ARITONANG, Budi Utomo, 9220669
- RAELMAN, Budi Utomo, 9238167
- SIHITE, Budi Utomo, 9214526 ■ PURBA K, Kuningan, 5264955 ■ NAIBAO, Cawang, 8577453
- SIMATUPANG, Cililitan, 80880572
- SIMALUNGUN, Kramat, 88980567
- MILU, Blok M, 7200669 ■ BERLIAN, Pramuka
- KA GROUP, Bekasi, 08129825236
- MANULLANG, Cimone, 08129590050
- YULIANI, Medan, 061-4157471
- MEDY, Surabaya, 031-83205231
- BIRO JABAR, Bandung, 022-4240689

Atau Hubungi

BAGIAN SIRKULASI

E-mail: sirkulasi@tokohindonesia.com

021-83701736 - 9101871

the experience site

THE EXCELLENT BIOGRAPHY JANGAN BELI KUCING DALAM KARUNG

**KENALI TOKOH
SEBELUM DIPILIH**

e-ti.com
TokohIndonesia.com
TokohNasional.com
ensiklopedi.com



ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

PENGALAMAN GURU TERBAIK

SITUS GUDANG PANGALAMAN

dibangun menjadi

ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

Tempat Anda menggali dan membagi pengalaman dengan mudah dan efektif, tanpa batas jarak, ruang dan waktu.

www.tokohindonesia.com

www.ensiklopedi.com

www.e-ti.com

Kini, dilengkapi

Majalah Biografi TokohIndonesia

PERTAMA DAN SATU-SATUNYA DI INDONESIA

Redaksi:

E-mail: redaksi@tokohindonesia.com

021-70776232


TUDOR
GENÈVE



The Tudor Hydronaut

CONSTRUCTED OF STAINLESS STEEL
OR IN A COMBINATION OF STEEL
AND 18CT YELLOW GOLD.

SCREWDOWN WINDING CROWN.

WATERPROOF-TESTED TO 200 METRES.

SCRATCH-PROOF SYNTHETIC
SAPPHIRE CRYSTAL.

A SELECTION OF 7 DIAL COLOURS.

AVAILABLE IN THREE SIZES:

GENTS, MID-SIZE, AND LADIES.

TUDOR WATCH CO. LTD., GENEVA, SWITZERLAND